



RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

**DINAS KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA
KOTA CIMAHI**



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) ini dengan baik. Renja Perubahan ini disusun sebagai upaya untuk menjawab tantangan dan dinamika perubahan lingkungan strategis, serta sebagai langkah konkret dalam mendukung tercapainya visi dan misi organisasi.

Dalam penyusunan Renja Perubahan ini, kami mengacu pada berbagai peraturan dan pedoman yang berlaku, serta memperhatikan berbagai masukan dari pemangku kepentingan. Dokumen ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi seluruh jajaran organisasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara efektif, efisien, dan akuntabel.

Kami menyadari bahwa penyusunan Renja Perubahan ini tidak akan terwujud tanpa dukungan dan kerjasama dari berbagai pihak. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dan dukungannya dalam proses penyusunan dokumen ini.

Kami berharap Renja Perubahan ini dapat memberikan arah yang jelas dan terukur bagi organisasi dalam menghadapi berbagai tantangan di masa depan, serta dapat menjadi acuan dalam melakukan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan. Semoga dokumen ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi peningkatan kinerja organisasi dan pelayanan kepada masyarakat.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI..... ii

BAB I PENDAHULUAN 1

 1.1. Latar Belakang..... 1

 1.2. Dasar Hukum Penyusunan 4

 1.3. Maksud dan Tujuan..... 7

 1.4. Dasar Pertimbangan Perubahan..... 8

 1.5. Sistematika Penulisan 9

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025 12

 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah. 12

 2.2. Analisis Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah..... 21

 2.3. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan I Tahun 2025 34

 2.4. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD..... 63

 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional..... 69

 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD..... 76

 3.3. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan dalam Perubahan 80

BAB IV..... 102

PENUTUP 102

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi Tahun 2025 disusun berdasarkan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi Tahun 2023-2026 serta mempertimbangkan perubahan-perubahan yang terjadi baik pada aspek lingkungan maupun kebijakan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota Cimahi.

Penyusunan Renja mengikuti tata cara sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Ketentuan ini diperkuat oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2025, yang menegaskan pentingnya penyesuaian dokumen RKPD terhadap arah kebijakan terbaru serta hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah tahun berjalan.

Merujuk pada ketentuan tersebut, Perubahan RKPD Kota Cimahi Tahun 2025 disusun sebagai respons strategis terhadap dinamika kebijakan pembangunan yang mengalami pergeseran signifikan pada awal periode perencanaan tahun 2025. Periode ini menandai fase transisi pemerintahan di tingkat nasional dan daerah, ditandai dengan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah hasil Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024. Perubahan kepemimpinan tersebut melahirkan dokumen perencanaan jangka menengah baru, baik di tingkat nasional melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029, maupun di tingkat daerah melalui RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029 dan RPJMD Kota Cimahi Tahun 2025–2029, yang membawa arah kebijakan dan prioritas pembangunan baru. Kondisi ini menuntut pemerintah daerah untuk segera menyesuaikan RKPD agar tetap selaras dengan visi dan misi kepala daerah terpilih, serta sinergis dengan kebijakan nasional

dan provinsi yang menjadi acuan utama dalam penyusunan program dan kegiatan pembangunan tahun berjalan.

Selain kerangka perencanaan, Perubahan RKPD Tahun 2025 juga merespons terbitnya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025, yang menginstruksikan Pemerintah Daerah untuk menyesuaikan dokumen perencanaan dan penganggaran daerah terhadap prioritas nasional dan hasil Pilkada Serentak 2024. Penyesuaian ini mencakup integrasi isu-isu strategis nasional seperti pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), penurunan stunting dan kemiskinan ekstrem, pengendalian inflasi, serta penguatan sektor ketahanan pangan, industri kreatif, dan penciptaan lapangan kerja produktif.

Lebih lanjut, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ tanggal 23 Februari 2025 tentang tentang Penyesuaian dan Efisiensi Belanja Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025, menekankan pentingnya efisiensi anggaran operasional dan optimalisasi alokasi belanja pada sektor prioritas. Edaran ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025, dan mewajibkan pemerintah daerah untuk melakukan *refocusing* belanja ke sektor strategis, membatasi belanja non-prioritas seperti perjalanan dinas dan honorarium, serta menyesuaikan rencana pendapatan terutama yang bersumber dari Transfer ke Daerah (TKD). Kebijakan ini berdampak langsung terhadap struktur dan komposisi belanja dalam dokumen RKPD, sehingga memerlukan penyesuaian melalui proses perubahan.

Selain itu, berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi Tahun 2024 serta realisasi capaian pembangunan hingga Triwulan I Tahun 2025, teridentifikasi adanya kebutuhan untuk melakukan penyesuaian terhadap sejumlah aspek substansi perencanaan. Sehingga perlunya penyelarasan terhadap indikator kinerja, target sasaran, prioritas pembangunan, dan alokasi

pendanaan, agar pelaksanaan pembangunan daerah dapat lebih efektif, efisien, dan adaptif terhadap dinamika kondisi aktual. Penyesuaian ini juga penting untuk memperkuat konsistensi antara dokumen perencanaan tahunan dengan arah kebijakan pembangunan jangka menengah, serta untuk memastikan tercapainya hasil yang terukur dan berdampak langsung bagi masyarakat.

Perubahan Renja Tahun 2025 ini juga menjadi dasar penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS-P) Tahun Anggaran 2025, serta menjadi bahan sinkronisasi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025. Oleh karena itu, penyusunan dokumen ini tidak hanya bersifat teknis-administratif, tetapi juga strategis dalam menjaga kesinambungan perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah.

Dengan mempertimbangkan seluruh aspek di atas, penyusunan Perubahan Renja Kota Cimahi Tahun 2025 merupakan langkah yang sistematis, terukur, dan berbasis regulasi untuk menjamin keterpaduan perencanaan pembangunan tahunan dengan arah kebijakan pembangunan nasional, provinsi, dan kota. Dokumen ini menjadi wujud komitmen Pemerintah Kota Cimahi dalam melaksanakan pembangunan yang terencana, responsif, dan akuntabel dalam mewujudkan tujuan pembangunan daerah.

Melalui Rencana Kerja Perubahan ini diharapkan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi dapat memberikan dukungan terhadap pencapaian visi misi Kota Cimahi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah mengganti Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembar Negara

- Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 41, Tambahan Lembar Negara Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembar Negara Nomor 6323);
 14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 15. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
 16. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
 17. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang TataCara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan

19. Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1402);
24. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 630);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 543);
27. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ tanggal 11 Februari 2025 tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah melalui Perubahan RKPD dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025;
28. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ tanggal 23 Februari 2025 tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2025;

29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2025–2045;
30. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2021 Nomor 287);
31. Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2025–2029 (dalam proses penetapan);
32. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Cimahi Tahun 2025–2045; dan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2021 Nomor 287);
33. Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 21 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 59 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi; dan
34. Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 12 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Cimahi Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Cimahi Tahun 2022 Nomor 659, Tambahan Berita Daerah Nomor 139).

1.3. Maksud dan Tujuan

Dokumen Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi Tahun 2025 dimaksudkan untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar bidang urusan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, serta mewujudkan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah, juga sebagai pedoman dalam tahapan penganggaran, mulai dari penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA), Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, serta Rancangan Perubahan APBD Kota Cimahi dalam penyempurnaan

rancangan akhir Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi Tahun 2025.

Adapun tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika Tahun 2025 adalah:

1. Mewujudkan pencapaian Visi dan Misi Kota Cimahi, terutama program-program prioritas pada tahun 2025;
2. Mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan;
3. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang lebih efektif dan efisien;
4. Pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Kota Cimahi Tahun Anggaran 2025 serta Rancangan Perubahan APBD Kota Cimahi Tahun Anggaran 2025.

1.4. Dasar Pertimbangan Perubahan

Dasar pertimbangan perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi Tahun 2025 sebagai berikut:

1. Perkembangan yang Tidak Sesuai dengan Asumsi Awal
Terdapat pergeseran prioritas pembangunan dibandingkan dengan yang telah direncanakan dalam RKPD Murni Tahun 2025. Perubahan ini terjadi sebagai akibat dari dinamika sosial, ekonomi, dan kebijakan yang berkembang setelah penetapan dokumen perencanaan awal, sehingga memerlukan penyesuaian substansi untuk menjamin relevansi dan efektivitas pelaksanaan pembangunan.
2. Perubahan Pagu Anggaran Program, Kegiatan, atau Subkegiatan
Perubahan dalam struktur anggaran terjadi pada tingkat program, kegiatan, maupun subkegiatan. Penyesuaian pagu ini dilakukan baik karena adanya arahan efisiensi dan refocusing belanja daerah sebagaimana diamanatkan dalam regulasi, maupun sebagai tindak lanjut atas kebijakan pembangunan yang baru. Penyesuaian ini diperlukan untuk menjaga akuntabilitas fiskal serta mendukung prioritas pembangunan daerah dan nasional.
3. Perubahan Target Kinerja
Terdapat penyesuaian terhadap target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan awal. Perubahan ini merupakan bagian dari proses penyelarasan terhadap capaian aktual, kapasitas pelaksanaan,

serta kebutuhan pencapaian target pembangunan strategis sesuai dengan arah kebijakan terbaru.

4. Perubahan Struktur Anggaran Daerah

Struktur pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah mengalami perubahan sebagai akibat dari realisasi fiskal dan perkembangan ekonomi daerah. Penyesuaian ini penting untuk menjaga keseimbangan fiskal serta memastikan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program pembangunan daerah.

5. Terdapat kebijakan anggaran tingkat Kota Cimahi dengan mengurangi pos belanja tertentu untuk dialihkan menjadi program prioritas lainnya, sehingga pengurangan anggaran ini harus dilakukan penyesuaian melalui Renja Perubahan.

6. Penyesuaian Outcome dan Output

Sejumlah subkegiatan mengalami penyesuaian output akibat perubahan pagu yang bersumber dari pemerintah pusat atau penyesuaian teknis pelaksanaan berdasarkan petunjuk operasional. Penyesuaian ini dilakukan untuk memastikan kesesuaian antara rencana pelaksanaan dengan ketentuan teknis yang berlaku.

7. Penyesuaian terhadap Regulasi Terbaru

Pemerintah pusat telah mengeluarkan berbagai kebijakan dan regulasi yang mengharuskan pemerintah daerah melakukan penyesuaian terhadap arah pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah. Dokumen Renja perlu direvisi untuk mengakomodasi kebijakan tersebut secara konsisten dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

8. Dukungan terhadap Sasaran Pembangunan Nasional dan Provinsi Tahun 2025

Perubahan RKPD juga diarahkan untuk memperkuat sinergi dengan sasaran pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam RPJMN Tahun 2025–2029, RKP Tahun 2025, serta sasaran pembangunan Provinsi Jawa Barat dalam RPJMD Tahun 2025–2029. Hal ini dilakukan untuk memastikan integrasi antara prioritas pembangunan lintas level pemerintahan secara menyeluruh.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Perubahan Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Cimahi tahun 2025 sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja SKPD, proses penyusunan Renja SKPD, keterkaitan antara Renja SKPD dengan dokumen RKPD, Renstra SKPD, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.1. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.3. Maksud dan Tujuan,

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja SKPD.

1.4. Sistematika Penulisan

Memuat Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1).

Mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja SKPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya.

2.2. Kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

2.4. Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.
- 3.2. Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD.
- 3.3. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan

BAB IV PENUTUP

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan dan Rencana tindak lanjut.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

1.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

Secara umum hasil evaluasi pelaksanaan renja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025 baik Program, Kegiatan maupun Sub Kegiatan telah menacapai target sebagaimana tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 2.1. Rekapitulasi Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Kota Cimahi

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah
Kota Cimahi

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)/2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)/2023			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)/2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
										Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)/2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)/2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)/2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
				1	2	3		4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2	16				URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	3,6		4,1	4,15	101,22	4,15	4,15	100%
						Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Persen	92%		90,75	93,64	103,18	94,7	0	0%
2	16	02			PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Tingkat Kematangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (Nilai Indeks)	Nilai Indeks	4,90	-	4,75	4,50	94,74	4,5	2,25	50%
2	16	03	2,01		Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perangkat daerah yang menggunakan sub domain cimahikota.go.id yang dikelola dan terkoneksi dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Persen	90%	-	90%	90%	100,00	0	0	0%
2	16	03	2,01	0003	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Unit	77	-	75	75	100,00	0	0	0%
2	16	03	2,02		Kegiatan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase aplikasi yang dikelola dan tersimpan di pusat data Pemerintah Daerah	Persen	95	-	90	90	100,00	90	90	100%
2	16	03	2,02	0001	Sub Kegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E -Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	4	-	1	1	100,00	0	0	0%
2	16	03	2,02	0003	Sub Kegiatan Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	Unit	1	-	1	1	100,00	0	0	0
2	16	03	2,02	0007	Sub Kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	Unit	12	-	3	3	100,00	0	0	0
2	16	03	2,02	0008	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Layanan	4	-	1	1	100,00	0	0	0
2	16	03	2,02	0009	Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	Dokumen	4	-	1	1	100,00	0	0	0

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)/2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)/2023			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)/2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
										Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)/2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)/2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)/2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2	16	03	2,02	0015	Sub Kegiatan Fasilitas penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	Jumlah laporan hasil fasilitas penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	Dokumen	1					1	0	0%
2	16	03	2,02	0016	Sub Kegiatan Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen keterhubungan pusat kendali dengan Pusat Data Nasional	Dokumen	1					1	1	100%
2	16	03	2,02	0020	Sub Kegiatan Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Aplikasi	3					3	0	0%
2	16	03	2,02	0021	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Aplikasi	1					1	1	100%
2	16	03	2,02	0024	Sub Kegiatan Implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten atau Kota Cerdas	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Perangkat Daerah	30					30	30	100
2	16	03	2,02	0027	Sub Kegiatan Implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten atau Kota Cerdas	Jumlah implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten/Kota Cerdas	Inovasi	15					15	0	0%
2	16	02		2	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persen	100%	-	100%	100%	100,00	100%	0%	65%
2	16	02	2,01		Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase analisis berita yang berkonten positif		87%	-	84%	84%	100,00	87%	91,5%	105%
2	16	02	2,01	0005	Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Dokumen	48	-	12	12	100,00	0	0	0%
2	16	02	2,01	0006	Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	Dokumen	48	-	12	12	100,00	0	0	0%
2	16	02	2,01	0007	Sub Kegiatan Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media	Layanan	10	-	10	10	100,00	0	0	0%
2	16	02	2,01	0014	Relasi Media	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	Aktivitas	12					12	4	42%
2	16	02	2,01	0017	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	Permohonan	84					84	37	44%
2	16	02	2,01	0023	Penyusunan Konten	Jumlah Konten Informasi Publik	Konten	1000					1000	748	75%
2	20				URUSAN STATISTIK	Indeks Pembangunan Statistik	Indeks	3,03	-	3	3,02	100,67	3,02	3,02	99,67%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)/2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)/2023			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)/2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
										Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)/2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)/2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)/2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2	20	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki ketersediaan data statistik sesuai dengan prinsip satu data	Persen	100%	-	100%	100%	100,00	47%	100%	100,00%
2	20	02	2,01		Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah ketersediaan data statistik sektoral yang memenuhi standar data	Data Set	1400	-	300	300	100,00	325	0	0
2	20	02	2,01	0001	<i>Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral</i>	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Dokumen	20	-	20	20	100,00	0	0	0%
2	20	02	2,01	0002	<i>Sub Kegiatan Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi</i>	Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Orang	270	-	60	60	100,00	0	0	0%
2	20	02	2,01	0007	<i>Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral</i>	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	Orang	180					180	60	34%
2	20	02	2,01	0010	<i>Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia</i>	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata	Dokumen	20					20	5	25%
					URUSAN PERSANDIAN	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	Indeks	400	-	410	534	130,24	535	0	0%
2	21	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan layanan persandian dalam rangka pengamanan informasi milik pemerintah	Persen	100%	-	100,00%	100,00%	100,00	100,00%	100,00%	100%
2	21	02	2,01		Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ASN yang telah menggunakan sertifikat elektronik	Persen	6	-	4	4	100,00	4	49	1225%
2	21	02	2,01	0002	<i>Sub Kegiatan Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</i>	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	10	-	2	2	100,00	3	0	0%
2	21	02	2,01	0004	<i>Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</i>	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	Perangkat Daerah	30	-	20	20	100,00	25	30	120%
2	21	02	2,02		Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik Pola Hubungan Komunikasi Sandi (PHKS) yang diterapkan pemerintah daerah berdasarkan pola hubungan komunikasi sandi;	Persen	30	-	100	100	100,00	100	30	30%
2	21	02	2,02	0001	<i>Sub Kegiatan Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</i>	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	Perangkat Daerah	20	-	30	30	1,00	30	30	100%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)/2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)/2023			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)/2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
										Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)/2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)/2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)/2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					NON URUSAN	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah		56,50	-	55,50	86,93	1,57	55,50	86,93	154%
2	16	01			Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Sakip Pemerintah Daerah	Nilai Angka	81	-	80,00	80,05	1,00	80,06	0	88%
						Indeks Profesionalitas ASN	Nilai Angka	79,68	-	79,48	95,98	1,21	96,00	0	0%
						Nilai IKM Perangkat Daerah	Nilai Angka	84,92	-	84,72	84,72	1,00	84,82	0	0%
2	16	01	2,01		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi yang disusun	Persen	100%	-	100%	100%	1,00	100%	50%	50%
2	16	01	2,01	0001	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	9	-	2	2	1,00	2	1	50%
2	16	01	2,01	0007	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Laporan	64	-	16	16	1,00	16	4	20%
2	16	01	2,03		Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Barang Milik Daerah;		48	-	12	12	1,00	12	3	25%
2	16	01	2,03	0002	Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	20	-	5	5	1,00	5	1	20%
2	16	01	2,06		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Bulan	48	-	12	12	1,00	12	3	20%
2	16	01	2,06	0002	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	160	-	40	40	1,00	40	11	27,5%
2	16	01	2,06	0004	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	60	-	15	15	1,00	15	7	47%
2	16	01	2,06	0005	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	-	3	3	1,00	3	0	0%
2	16	01	2,06	0009	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	2,35	-	60	50	0,83	60	6	10%
2	16	01	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah bulan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Bulan	12					12	4	33%
					Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan		1					1	1	100%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)/2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)/2023			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)/2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
										Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)/2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)/2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)/2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2	16	01	2,08		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Bulan	48	-	12	12	1,00	12	3	20%
2	16	01	2,08	0001	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	64	-	16	16	1,00	16	4	25%
2	16	01	2,08	0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	64	-	16	16	1,00	16	4	25%
2	16	01	2,08	0004	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	64	-	16	16	1,00	16	4	25%
2	16	01	2,09		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan pemeliharaan barang milik daerah	Bulan	48	-	12	12	1,00	12	3	25%
2	16	01	2,09	0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	20	-	5	5	1,00	5	5	100%
2	16	01	2,09	0009	Sub Kegiatan Pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	4	-	1	1	1,00	1	0	0
2	16	01	2,09	0010	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	71	-	15	15	1,00	18	10	55%
2	16	01	2,05		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai Yang terfasilitasi pelayanan administrasi kepegawaian	Persen	100	-	100	100	1,00	100	100	100%
2	16	01	2,05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	37						0	0%
2	16	01	2,05	0010	Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	40	-	40	40	1,00	45	45	100%
2	16	01	2,05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	11					11	0	0%
2	16	01	2,02		Kegiatan Administrasi Keuangan	Jumlah Dokumen Keuangan Yang Disusun;	Dokumen	48	-	12	12	1,00	12	3	25%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)/2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)/2023			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)/2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
										Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)/2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)/2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)/2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2	16	01	2,02	0001	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	136	-	34	34	1,00	34	34	100%
2	16	01	2,02	0003	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	72	-	18	18	1,00	18	4	22%

Tabel 2.2. Capaian Program Pada Tahun 2024

Capaian Program pada Tahun 2024 telah melampaui target dijelaskana pada tabel berikut:

No	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	KETERANGAN	FAKTOR-FAKTOR PENDORONG
1	2	3	4	5	6	7
I	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Tingkat kematangan teknologi informasi dan Komunikasi (Nilai Indeks)	2,75	4,50	Tercapai	Tingkat kematangan teknologi dan informasi tercapai melebihi target hal ini disebabkan oleh peningkatan dalam pengelolaan pembangunan Aplikasi SPBE, Layanan jaringan intra, penggunaan Sistem Penghubung Layanan dan Penyediaan pusat data pemerintah Kota Cimahi.
II	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	100	100	Tercapai	Pada tahun 2023 capaian target sebesar 100%, penyebaran informasi public dupayakan agar tersampaikan kepada masyarakat secara masif kepada seluruh masyarakat. Penyampaian informasi dilakukan melalui 10 kanal media. 1. Penulisan artikel pada website atau media lainnya. 2. Advertorial atau filer di TV Nasional. 3. Publikasi media radio daerah atau iklan layanan masyarakat. 4. Reportase on the spot / adevrtorialdi TV daerah Tipe. 5. Reportase on the spot / adevrtorialdi TV daerah Tipe 6. Talkshow di TV Daerah. 7. Publikasi media onlie. 8. Publikasi media cetak regional. 9. Publikasi SKH/SKM. 10. Publikasi melalui media online atau iklan display.
III	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki ketersediaan data statistik sesuai dengan prinsip satu data	100	100	Tercapai	Seluruh Perangkat Daerah pada tahun 2023 telah memiliki ketersediaan data statistik sesuai dengan prinsip satu data. Ketersediaan data statistik sektoral yang dihasilkan oleh perangkat daerah sebagai produsen data dilaksanakan melalui portal https://opendata.cimahikota.go.id/ . Portal open data Cimahi terhubung dengan ekosistem data Jawa Barat dan dapat berbagi pakai dengan stake holder yang lain, yang telah

No	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	KETERANGAN	FAKTOR-FAKTOR PENDORONG
						memiliki standar kalitas data yang telah ditingkatkan.
IV	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan layanan persandian dalam rangka pengamanan informasi milik pemerintah	100	100	Tercapai	Penyelenggaraan urusan persandian manfaat yang ingin dicapai adalah menjamin keamanan data strategis, mendukung tatakelola pemerintahan yang baik dan meningkatkan kepercayaan publik pada pemerintahan dilakukan melalui layanan: 1. Fasilitasi Tanda tangan elektronik. 2. Fasilitasi Email resmi kedinasan (cimahikota.go.id). 3. Vulnerable test untuk menjamin keamanan data.
V	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Sakip Perangkat Daerah	80	80.05	Melebihi Target	
		Indeks Profesionalitas ASN	79,48	95,98	Melebihi Target	Seluruh ASN lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi didorong untuk melaksanakan pengembangan kompetensi serta penilaian baik dari pimpinan terhadap capain kinerja menjadi pendorong meningkatnya Indeks Profesional ASN.
		Nilai IKM Perangkat Daerah	84,72	84,72	Melebihi target	Pelayanan yang diselenggarakan menaerapkan perinsip-prinsip SPBE sehingga mempermudah akses masyarakat maupun perangkat daerah yang memanfaatkan layanan Diskominfo.

Faktor pendorong tercapainya seluruh target kinerja baik pada tingkat sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi adalah sebagai berikut:

- Adanya dasar hukum yang jelas sebagai dasar pelaksanaan kegiatan sebagai pedoman.
- Adanya keterlibatan serta komitmen pimpinan secara berjenjang dalam setiap pelaksanaan kegiatan yang diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.

1.2. Analisis Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah.

Tabel 2.2.1. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra PD				Realisasi Capaian			Proyeksi			
				2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2023	2024	2025	2026
1	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	-	-	3,00	3,20	3,40	3,60	3,09	4,02	4,15	3,00	3,20	3,40	3,60
2	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	-	-	80%	84%	88%	92%	73	90,48	93,64	80%	84%	88%	92%
3	Indeks Pembangunan Statistik	-	-	2,00	3,00	3,00	4,00	N/A	2,53	3,01	2,00	3,00	3,00	4,00
4	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	-	-	351	370	390	400	386	409	534	351	370	390	400
5	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	-	-	55,00	55,50	56,00	56,50	78,71	86,93	88,43	55,00	55,50	56,00	56,50

Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah suatu sistem yang digunakan untuk mengukur dan mengevaluasi tingkat kesiapan dan kinerja pemerintah dalam menerapkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam proses pemerintahan. Ini adalah alat yang digunakan untuk menilai sejauh mana pemerintah telah bergerak menuju transformasi digital dalam menyelenggarakan layanan publik, mengelola data, dan berkomunikasi dengan masyarakat.

SPBE bertujuan untuk mendorong pemerintah untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, akuntabilitas, dan kualitas layanan kepada masyarakat melalui penggunaan TIK.

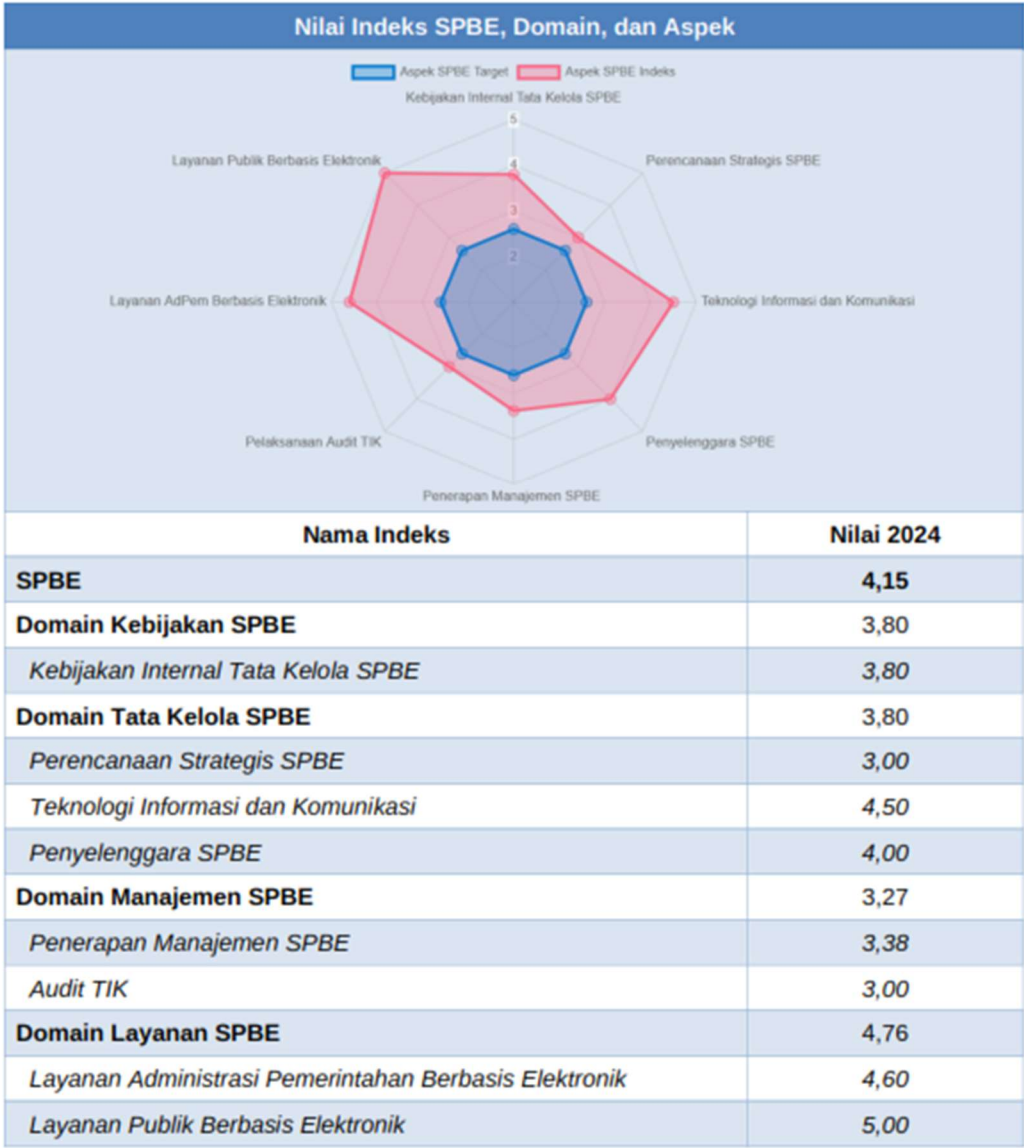
Untuk memastikan pelaksanaan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah selaras dengan prinsip terintegrasi dan terpadu, maka Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah diharapkan menerapkan unsur-unsur SPBE sesuai dengan kerangka kerja Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE agar penerapan SPBE dapat berjalan efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta dapat menghasilkan layanan SPBE yang berkualitas dan optimal.

Untuk mengukur perkembangan penerapan SPBE di Indonesia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bersama Tim Koordinasi SPBE Nasional melaksanakan Pemantauan dan Evaluasi SPBE. Pada tahun 2024, telah dilaksanakan Pemantauan SPBE

dengan menggunakan instrumen sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE.

Pengukuran tingkat capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dengan realisasi. Indeks SPBE pada tahun 2024 ditergetkan ditargetkan sebesar 4,10. Berdasarkan hasil Evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi capaian SPBE Kota Cimahi sebesar 4,15 dengan predikat sangat baik, sehingga tingkat capaian kinerja sasaran Meningkatnya Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada tahun 2024 sudah melebihi harapan/target yaitu sebesar 101% (sangat baik).

Berdasarkan laporan Hasil Evaluasi SPBE Kota Cimahi Tahun 2024, raihan dan kurva indeks SPBE Pemerintah Kota Cimahi adalah seperti yang ditunjukkan pada Gambar sebagai berikut :



Gambar 2.1 Indeks SPBE Pemerintah Kota Cimahi Tahun 2024

Hasil pelaksanaan Pemantauan SPBE yang dilakukan pada tahun 2024 ini diharapkan dapat digunakan dalam menentukan tindak lanjut yang harus dilakukan dalam mendorong peningkatan penerapan SPBE secara menyeluruh pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah di masa mendatang dalam rangka meningkatkan kualitas layanan pemerintah kepada masyarakat dan terwujudnya digitalisasi pemerintah dalam kerangka reformasi birokrasi nasional.

Indeks Keterbukaan Informasi Publik alat yang digunakan untuk mengukur tingkat keterbukaan dan transparansi informasi publik yang disediakan oleh pemerintah. Indeks ini dirancang untuk memberikan

gambaran tentang sejauh mana pemerintah mengungkapkan data, informasi, dan kebijakan kepada masyarakat, bisnis, atau pihak-pihak yang berkepentingan. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut tentang Indeks Keterbukaan Informasi Publik.

Keterbukaan informasi publik merujuk pada praktik pemerintah yang mengutamakan akses terbuka dan bebas terhadap data, dokumen, dan informasi yang relevan bagi masyarakat umum. Ini mencakup data kebijakan, data anggaran, data administratif, dan informasi lainnya yang relevan dengan tindakan dan keputusan pemerintah yang memiliki kriteria sebagai dokumen atau informasi publik. Pengukuran Indeks Keterbukaan Informasi Publik untuk mengukur tingkat keterbukaan pemerintah dan transparansi dalam memberikan informasi kepada masyarakat, mendorong pemerintah untuk meningkatkan implementasi keterbukaan informasi publik.

Keterbukaan informasi publik pada tahun 2024 ditargetkan sebesar 90, 75 berdasarkan hasil monitoring, evaluasi dan peringkat penerapan keterbukaan informasi publik pada Badan Publik di Jawa Barat Tahun 2024 sebesar 93,64 dengan kualifikasi Informatif. Capaian kinerja sasaran Meningkatnya penyelenggaraan implementasi keterbukaan informasi publik mencapai 103% sehingga capaian kinerja Indeks keterbukaan Informasi Publik tercapai melebihi harapan dengan predikat sangat baik.

Indeks Pembangunan Statistik merupakan alat yang digunakan untuk mengukur perkembangan dan kinerja sektor statistik. Ini adalah indikator yang digunakan untuk menilai kemajuan dalam pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyebaran data statistik, yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan, pengambilan keputusan, dan pemantauan progres pembangunan nasional. Berikut penjelasan lebih lanjut tentang Indeks Pembangunan Statistik di Indonesia:

Indeks Pembangunan Statistik mencakup aspek:

1. Kualitas data, yaitu keakuratan dan kualitas data statistik yang dihasilkan.
2. Pengolahan data, yaitu kemampuan lembaga statistik dalam mengolah data secara efisien dan handal.
3. Analisis, kemampuan dalam melakukan analisis data yang mendalam.

4. Diseminasi data, sejauh mana data statistik disebarkan secara luas dan mudah diakses oleh masyarakat dan pemangku kepentingan.
5. Sumber daya manusia menilai kompetensi dan kapasitas sumber daya manusia yang terlibat dalam statistik.

Keluaran EPSS adalah Indeks Pembangunan Statistik (IPS), yaitu suatu indikator yang menggambarkan tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral di masing-masing instansi pemerintah penyelenggara kegiatan statistik sektoral.

Target IPS pada tahun 2024 sebesar 3,00 dan berdasarkan hasil Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) Tahun 2024 yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik sebesar 3,01 dengan kategori Cukup sehingga capaian indikator sebesar 101% (sangat baik) melebihi harapan.

Indeks Keamanan Informasi (KAMI) adalah alat yang digunakan untuk mengukur tingkat keamanan informasi dalam suatu organisasi atau lingkungan kerja. Indeks ini bertujuan untuk menilai sejauh mana organisasi telah melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk melindungi data dan informasi penting mereka dari ancaman keamanan, termasuk peretasan, kehilangan data, dan pelanggaran keamanan.

Tujuan pengukuran ini adalah untuk menilai dan memantau tingkat kesiapan dan efektifitas kebijakan, prosedur, dan kontrol keamanan informasi dan dirancang untuk membantu organisasi memahami risiko keamanan informasi dan untuk meningkatkan tingkat perlindungan yang ada.

Sasaran meningkatnya keamanan sistem informasi pemerintah daerah diukur menggunakan indikator Indeks Keamanan Informasi (KAMI). Indeks (KAMI) merupakan alat untuk menganalisa tingkat kesiapan pengamanan informasi di suatu organisasi. Alat evaluasi ini tidak ditujukan untuk menganalisa kelayakan atau efektifitas bentuk pengamanan yang ada, melainkan sebagai perangkat untuk memberikan gambaran kondisi kesiapan (kelengkapan dan kematangan) kerangka kerja keamanan informasi kepada pimpinan instansi. Evaluasi dilakukan terhadap sebagai berbagai area yang menjadi target penerapan keamanan informasi dengan ruang lingkup pembahasan yang juga memnuhi semua aspek keamanan yang didefinisikan oleh standar ISO/IEC 27001:2013.

Pada Tahun 2023 Indeks KAMI yang ditargetkan adalah 410 dan hasil penilaian yang telah dilakukan sebesar 534 dengan demikian capaian sasaran meningkatnya keamanan sistem informasi pemerintah daerah tercapai melampaui target sebesar 130 % (sangat baik).

Indeks Reformasi Birokrasi adalah alat yang digunakan untuk mengukur tingkat kemajuan dan efektivitas reformasi birokrasi dalam suatu pemerintahan. Reformasi birokrasi adalah serangkaian langkah dan upaya untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, akuntabilitas, dan kualitas layanan yang diberikan oleh lembaga-lembaga pemerintah. Indeks ini dirancang untuk mengevaluasi sejauh mana pemerintah telah berhasil mengimplementasikan reformasi birokrasi.

RB menjadi salah satu dari lima agenda prioritas Pembangunan Nasional yang menjadi fokus dari pemerintahan. Arahan Presiden tentang RB berkaitan dengan tiga hal utama, yaitu mewujudkan birokrasi yang mampu menciptakan hasil, birokrasi yang mampu menjamin agar manfaat kebijakan itu dirasakan oleh masyarakat (*making delivered*), serta birokrasi yang lincah dan cepat (*agile bureaucracy*). Arahan Presiden tersebut dapat terwujud apabila ada upaya perbaikan dalam tata kelola pemerintahan yang menyentuh akar permasalahan, tidak hanya menjadi agenda rutin tanpa memberikan daya ungkit yang konkret.

Penilaian Indeks RB Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi Tahun 2024 mendapatkan predikat A dengan nilai 88,43. Capaian ini merupakan capaian tertinggi Indeks RB tingkat Kota Cimahi.

Analisis terhadap kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi, sebagai berikut :

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi melaksanakan 3 urusan yang menjadi kewenangan yaitu Urusan Komunikasi dan Informatika, Urusan Persandian, dan Urusan Statistik. Pelayanan yang dilaksanakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi dapat dikelompokkan menjadi 2 jenis layanan, yaitu:

- a. Layanan Publik Secara Langsung
Terdiri dari : Layanan Pengaduan Masyarakat, Layanan Informasi, Layanan Publikasi
- b. Layanan Publik Secara Tidak Langsung

Terdiri dari : Layanan Data Statistik, Layanan Publikasi, Layanan Dokumentasi, Layanan Aplikasi TIK, Layanan Infrastruktur Jaringan TIK, Layanan Persandian.

Kinerja masing-masing layanan tersebut didukung oleh beberapa aspek kinerja, sehingga untuk mengevaluasi kinerja layanan tersebut dilakukan analisa terhadap capaian indikator masing-masing aspeknya. Capaian kinerja layanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi sebagai berikut:

A. Layanan Publik Secara Langsung

a. Layanan Pengaduan Masyarakat

Layanan Pengaduan Masyarakat dilakukan melalui aplikasi PESDUK (Pesan Penduduk), layanan surat baik elektronik maupun fisik, pengaduan langsung dan pengaduan melalui media massa. Secara umum layanan Pengaduan Masyarakat cukup baik karena hampir semua pengaduan selalu direspon oleh pengelola. Namun kendala yang dihadapi dalam layanan ini adalah pada tindak lanjut terhadap masalah yang disampaikan oleh masyarakat yaitu tidak terkontrolnya penanganan permasalahan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangannya. Selain itu layanan Pengaduan Masyarakat belum terintegrasi dengan instansi/lembaga Pemerintah instansi vertikal antara lain kepolisian, BPN, Kementerian Agama, BPS.

b. Layanan Informasi

Layanan Informasi, secara fisik telah mengalami peningkatan dengan dilaksanakannya renovasi loket pelayanan. Layanan ini didukung oleh Tim PPID Kota Cimahi yang terdiri dari PPID Utama yaitu Kepala Bidang IKPS Dinas Komunikasi dan Informatika dan PPID Pembantu yaitu Sekretaris Perangkat Daerah Kota Cimahi. Kendala yang dihadapi dalam layanan ini adalah:

1. Belum adanya SOP untuk melakukan Uji Konsekuensi Informasi pada PPID Kota Cimahi
2. Pengetahuan terkait Keberatan Informasi dan Sengketa Informasi yang dirasa masih kurang pada PPID Pembantu di tiap Perangkat Daerah.
3. Belum terbentuknya KIM (Kelompok Informasi Masyarakat) Kota Cimahi. Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) adalah kelompok

yang dibentuk oleh masyarakat, dari masyarakat, dan untuk masyarakat secara mandiri dan kreatif yang aktivitasnya melakukan kegiatan pengelolaan informasi dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan nilai tambah.

4. Informasi pada website Pemerintah Kota Cimahi kurang ter-*update*

c. Layanan Publikasi

Layanan Publikasi dilaksanakan melalui media sosial dan kerjasama dengan media massa. Layanan publikasi melalui media sosial terdapat 2 yaitu Facebook dan Instagram. Publikasi melalui media sosial meliputi publikasi kegiatan-kegiatan Kepala Daerah, capaian-capaian pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan serta program-program prioritas. Sedangkan publikasi melalui media massa meliputi berbagai media koran/majalah, media *online*, media radio dan media televisi. Publikasi melalui media massa meliputi kegiatan-kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah Kota Cimahi. *Pers release* dilakukan untuk program-program prioritas Pemerintah Kota Cimahi.

Kendala yang dihadapi dalam layanan publikasi, sebagai berikut:

1. Publikasi melalui media sosial mempunyai kecenderungan terfokus pada aktivitas Kepala Daerah dan kurang didukung oleh narasi tentang pembangunan.
2. Publikasi melalui media sosial kurang mendapat respon dari masyarakat karena kecenderungan komunikasi yang dilakukan hanya satu arah yaitu respon dari masyarakat tidak diberikan tanggapan karena tidak didukung dengan tim melainkan hanya dilaksanakan oleh operator.
3. Tidak ada *feedback* dari analisis berita yang dilakukan sebagai bahan penyusunan perencanaan publikasi.

B. Layanan Publik Secara Tidak Langsung

a. Layanan Data Statistik

Untuk Layanan Data Statistik, pada tahun 2017 telah dibangun aplikasi OPEN DATA sebagai sarana publikasi data statistik sektoral Pemerintah Kota Cimahi. Sebagai Wali Data, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi mempunyai tugas

memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data tingkat daerah sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia; menyebarluaskan Data dan Metadata; dan membantu Pembina Data tingkat daerah dalam membina Produsen Data tingkat daerah. Kendala yang dihadapi dalam layanan Data Statistik adalah:

1. Belum optimalnya penyelenggaraan statistik sektoral antara “Bappeda dengan Diskominfo;
 2. Pengelola Data pada PD dibebani pekerjaan pengumpulan data dari berbagai instansi (Bappeda, Setda, Kominfo, Instansi Vertikal) sehingga tidak fokus;
 3. Pemahaman tentang statistik sektoral masih rendah dan masih terbatasnya SDM yang berlatar belakang pendidikan Statistik, kemampuan analisis dan grafis;
 4. Penggunaan *Platform* yang berbeda pada aplikasi yang dibangun perangkat daerah sehingga menghambat proses integrasi.
- b. Layanan Dokumentasi
- Layanan Dokumentasi dilakukan hanya kegiatan pimpinan kepala daerah.
- c. Layanan Aplikasi TIK
- Layanan Aplikasi TIK meliputi layanan domain dan subdomain, pengelolaan/kontrol aplikasi-aplikasi PD, pendampingan pembangunan aplikasi PD dan integrasi aplikasi-aplikasi PD.
- d. Layanan Infrastruktur Jaringan TIK
- Seluruh Perangkat Daerah di lingkup perkantoran Pemkot Cimahi telah tersambung dengan sambungan intranet. Sedangkan yang di luar lingkup perkantoran Pemkot Cimahi menggunakan jaringan *Fiber Optic*. Belum seluruhnya kantor layanan tersambung dengan *fiber optic* melainkan menggunakan saluran VPN. Kendala dalam layanan infrastruktur jaringan TIK yaitu:
1. Pusat Data/Data Centre belum memadai dan bercampur dengan ruang kerja administrasi.
 2. Penggelaran Jaringan *Fiber Optic* belum menyeluruh sesuai dengan perencanaan.

3. Implementasi dan Optimalisasi Jaringan CCTV untuk kepentingan implementasi *Smart City* belum dilakukan.
4. Belum lengkapnya perangkat pendukung kinerja jaringan baik perangkat keras maupun perangkat lunak serta perangkat pengamanan jaringan di dalamnya.
5. Adanya ancaman akan keamanan jaringan yang terus meningkat yang harus segera diantisipasi segera.
6. Belum tersediannya kebijakan, standard dan prosedur.

e. Layanan Persandian

Layanan persandian meliputi layanan keamanan informasi, sertifikasi elektronik dan layanan persandian. Kendala yang dihadapi dalam layanan persandian adalah:

1. Kategori Sistem Elektronik tinggi yang dimiliki oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi membutuhkan minimal tingkat kematangan tata kelola yang Terdefinisi dan Konsisten (tingkat III) dengan kelengkapan control keamanan yang cukup lengkap. Mengacu pada hasil penilaian mandiri dengan menggunakan instrument Indeks KAMI, tingkat kematangan tata kelola Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi baru ditingkat Penerapan Kerangka Kerja Dasar (tingkat II) dengan kelengkapan kontrol keamanan yang perlu perbaiki
2. Belum adanya dokumen perencanaan strategis persandian dan keamanan informasi yang menjadi pedoman penyelenggaraan program/kegiatan bidang persandian dan keamanan informasi
3. Belum ada proses penilaian kinerja keamanan informasi untuk mengukur tingkat ketercapaiannya terhadap sasaran keamanan informasi
4. Kebijakan tata kelola keamanan informasi sudah ada, namun masih belum disesuaikan dengan regulasi maupun standar yang terbaru
5. SOP keamanan informasi yang ada saat ini belum memenuhi semua kebutuhan organisasi, dan masih mengacu pada regulasi maupun standar lama

6. Kurang optimalnya layanan persandian dan keamanan informasi karena belum tersediaannya sarana dan prasarana pendukung
7. *Security*, Keamanan Aplikasi yang telah dibangun, Keamanan Akses Jaringan Internet maupun Intranet dan ketersediaan Standar Teknis Penerapan Aplikasi disetiap SKPD;

Pada Tahun Anggaran 2024 kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi secara umum rata melebihi target dengan rata-rata capaian sebesar 107 %. Pencapaian Kinerja ini dicapai dengan komitmen bersama yang kuat dan kerja keras seluruh elemen organisasi dari mulai pucuk pimpinan hingga lapisan paling bawah.

Capaian kinerja yang telah dicapai pada Tahun 2024 dipandang perlu untuk melakukan penyesuaian terget pada tahun perencanaan 2025. Penyesuaian target untuk rencan kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi dilakukan dengan telaahan dan analisis terlebih dahulu melalui reuiu Rencana Strategis Tahun 2023-2036. Penyesuaian target dilakukan terhadap Indikator Kinerja Kunci dan Program sebagai berikut:

Hasil evaluasi terhadap capaian kinerja sasaran IKU Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024 dan rekomendasi dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) Tahun 2024 terdapat beberapa capaian yang melampaui target bahkan melebihi target rencana tahun 2025, indikator kinerja utama yang telah melampaui target sebagai berikut:

Tabel 2.2.2. Perbandingan Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran							
				Pada Tahun Ke							
				2023		2024		2025		2026	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Meningkatkan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik	Meningkatnya tata kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3.00	4,02	3.10	4,15	4.15			
2	Meningkatkan penyelenggaraan implementasi keterbukaan informasi publik	Meningkatnya penyelenggaraan implementasi keterbukaan informasi publik	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	80%	90,48%	84%	93,64	93,7%		93,75%	
3	Mewujudkan data statistik sektoral daerah yang berkualitas	Terwujudnya data statistik sektoral daerah yang berkualitas	Indeks Pembangunan Statistik	2	2,53	3	3,01	3,01		3,02	
4	Meningkatkan keamanan sistem informasi pemerintah daerah	Meningkatnya keamanan sistem informasi pemerintah daerah	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	351	409	370	534	535		550	
5	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Meningkatnya tata kelola pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	55	78,71	55,5	88,43	88,45		88,50	

Berdasarkan capaian tersebut, maka perlu dilakukan penyesuain rencana target untuk tahun anggaran 2024 s.d. 2026 sebagai berikut:

Tabel 2.2.3. Perubahan Terget Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran							
				Pada Tahun Ke							
				2023		2024		2025		2026	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Meningkatkan Kualitas dan Inovasi Pelayanan Publik	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3.00	4,02	4,10	4,15	4.15		4,15	
			Indeks Keterbukaan Informasi Publik	80%	90,48%	90,75%	93,64	93,7		93,75%	
			Indeks Pembangunan Statistik	2	2,53	3	3,02	3,02		3,10	
			Indeks Keamanan	351	409	410	534	535		415	

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran							
				Pada Tahun Ke							
				2023		2024		2025		2026	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
			Informasi (KAMI)								
			Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	55	86,93	86,96	88,43	88,45		88,50	

Selain perubahan IKU diskominfo, terdapat beberapa kinerja Program yang telah melampau target pada tahun 2025 sehingga dilakukan penyesuaian target sebagai berikut:

Tabel 2.2.4. Perubahan Terget Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi

No	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET			
				2023	2024	2025	2026
1	2		3	4	5	6	7
I	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Meningkatkan penyelenggaraan e-Government	Tingkat kematangan teknologi informasi dan Komunikasi (Nilai Indeks)	2,5	4,50	4,50	4,50
II	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Meningkatnya penyebarluasan informasi pembangunan daerah dan komunikasi publik yang efektif dan efisien	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebarluasan informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	60	100	100	100
III	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Meningkatnya tata Kelola statistik sektoral daerah	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki ketersediaan data statistik sesuai dengan prinsip satu data	37	100	100	100

No	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET			
IV	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Meningkatnya keamanan informasi pemerintah daerah	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan layanan persandian dalam rangka pengamanan informasi milik pemerintah	33,33	100	100	100
V	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kinerja Organisasi	Nilai Sakip Perangkat Daerah	71	74,5	80,06	80,10
			Indeks Profesionalitas ASN	50	79,48	96,00	96,01
			Nilai IKM Perangkat Daerah	76,61	84,72	84,82	84,92

1.3. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan I Tahun 2025

Prioritas pembangunan Kota Cimahi pada tahun 2025 disusun berdasarkan beberapa hal yang menjadi mandat untuk dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Cimahi, baik itu program dukungan terhadap pencapaian tujuan pembangunan nasional dan provinsi serta terhadap target global dan nasional lainnya seperti SDG’s dan SPM. Permasalahan dan isu strategis juga menjadi hal yang menjadi dasar penentuan prioritas pembangunan Kota Cimahi pada Tahun 2025.

Sehingga fokus pembangunan daerah diberikan perhatian khusus pada:

1. Optimalisasi tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*);
2. Prioritas Pembangunan Nasional dalam RKP Tahun 2025 dan kebijakan Nasional melalui RPJMN;
3. Prioritas pembangunan Provinsi Jawa barat dalam RKPD Provinsi Jawa barat tahun 2025; dan
4. Pencapaian Indikator Kinerja Daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2023-2026.

Berdasarkan permasalahan, isu strategis dan tema pembangunan Kota Cimahi maka disusun prioritas pembangunan Kota Cimahi tahun 2025 sebagai berikut:

1. Penguatan kualitas pelayanan kesehatan;
2. Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan;
3. Peningkatan aksesibilitas perlindungan dan pelayanan sosial;
4. Peningkatan kualitas keluarga sejahtera dan pemberdayaan masyarakat berbasis gender;
5. Peningkatan sumber daya olahraga, daya saing pemuda dan pelaku budaya;
6. Peningkatan kapasitas dalam penanggulangan bencana;
7. Adaptasi dan mitigasi perubahan iklim;
8. Peningkatan iklim investasi;
9. Peningkatan daya beli masyarakat;
10. Peningkatan daya saing pelaku usaha ekonomi dan produk lokal;
11. Menjaga ketahanan pangan daerah;
12. Penyerapan tenaga kerja;
13. Pengembangan dan peningkatan aksesibilitas kawasan strategis kota;
14. Pemenuhan infrastruktur pelayanan dasar, perumahan, dan awasan permukiman;
15. Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi pelayanan publik; dan
16. Fasilitasi pemilihan umum serentak.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi melaksanakan urusan Komunikasi dan Infomatika, Persandian dan Statistik diharapkan mampu mendukung pencapaian Visi dan Misi Wali Kota Cimahi terpilih periode 2025-2029: “CIMAHI MANTAP” MELALUI KOLABORASI ANTAR GENERASI YANG MAJU, UNGGUL DAN BERKELANJUTAN. Visi ini diuraikan dalam akronim MANTAP:

- 1) MAJU; Mewujudkan Pembangunan Kota Cimahi yang lebih maju di segala bidang.
- 2) AGAMIS; Menciptakan kota yang agamis serta menjunjung tinggi nilai religius dan toleran.

- 3) NYAMAN; Mewujudkan lingkungan asri dan berkelanjutan dengan fasilitas ruang ekspresi publik yang lebih representatif.
- 4) TELADAN; Menjadikan Cimahi sebagai kota teladan dalam tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel dan berintegritas.
- 5) AMAN; Mewujudkan lingkungan masyarakat yang damai, tertib dan teratur.
- 6) PRODUKTIF; Meningkatkan daya kreativitas masyarakat yang produktif menuju masyarakat sejahtera.

Misi RPJMD Kota Cimahi Tahun 2025-2029, adalah sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan Kota Cimahi yang Maju dengan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Agamis dan Berkarakter.
- 2) Meningkatkan Pembangunan Ekonomi yang Produktif.
- 3) Menjadikan Cimahi sebagai Kota Teladan dalam Tata Kelola Pemerintahan.
- 4) Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kondusifitas Kota yang Aman, Nyaman dan Berkelanjutan.
- 5) Meningkatkan Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat melalui Kolaborasi Antar Generasi.

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi sampai dengan Trwiiwulan I Tahun 2025 dilakukan untuk mengetahui kemampuan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi capaian target kinerja serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Alokasi anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025 sebesar Rp. 16.224.270.964 dan realisasi anggaran sampai dengan triwulan I sebesar Rp. 3.569.259.934 (22,00%). Secara umum capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi sampai dengan Triwulan I sesuai dengan rencana, capaian kinerja keuangan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Rp. 1.984.349.845 (23,85%), realisasi Program Informasi Dan Komunikasi Publik Rp. 906.348.916 (24,63%), realisasi Program Aplikasi Informatika Rp. 353.168.839 (9,15%), realisasi Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Rp. 260.508.160 (46,23%), Realisasi Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral Rp. 64.884.174 (17,40%). Secara umum pelaksanaan program kegiatan yang telah dilaksanakan

pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi sudah cukup baik dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya, adapun terdapat beberapa kegiatan yang realisasinya masih rendah disebabkan masih dilakukan proses adminsitasi yang masih berjalan dalam tahap pencairan anggaran.

Evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025 Kota Cimahi sampai dengan triwulan I secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.3.1. Evaluasi Renja Sampai Dengan Triwulan I Tahun 2025 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi

Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kota Renja Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi Periode Pelaksanaan: 2025 Triwulan: 1																										
Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(Output)/Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah Kota sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Kota sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kota Tahun Berjalan (Tahun n- 1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun n-1 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d Tahun (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun ...)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi s/d Tahun ... (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket	
									I		II		III		IV											
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp										K
	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15	16
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																									
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA																									
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP					72	8.319.287.514	0	1.984.349.845							0	1.984.349.845	0.00	23.85					Dinas Komunikasi dan Informatika	
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM Perangkat Daerah					82	8.319.287.514	0	1.984.349.845							0	1.984.349.845	0.00	23.85					Dinas Komunikasi dan Informatika	

2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Profesionalitas ASN					52	8.319.287.514	0	1.984.349.845							0	1.984.349.845	0.00	23.85					Dinas Komunikasi dan Informatika	
2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi yang disusun					100	443.515.000	50	87.996.000							50	87.996.000	50.00	19.84					Dinas Komunikasi dan Informatika	
2.16.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					2	104.970.000	1	30.328.000							1	30.328.000	50.00	28.89					Dinas Komunikasi dan Informatika	
2.16.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					16	338.545.000	4	57.668.000							4	57.668.000	12.50	17.03					Dinas Komunikasi dan Informatika	
															Rata-Rata Capaian Sub Kegiatan:			31.25	22.96							
															Predikat Capaian Sub Kegiatan:			Sangat Rendah	Sangat Rendah							
2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Keuangan Yang Disusun					12	6.622.054.614	3	1.492.651.273							3	1.492.651.273	25.00	22.54					Dinas Komunikasi dan Informatika	
2.16.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					34	6.607.760.114	34	1.490.671.423							34	1.490.671.423	100.00	22.56					Dinas Komunikasi dan Informatika	
2.16.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					18	14.294.500	4	1.979.850							4	1.979.850	22.22	13.85					Dinas Komunikasi dan Informatika	
															Rata-Rata Capaian Sub Kegiatan:			61.11	18.20							
															Predikat Capaian Sub Kegiatan:			Rendah	Sangat Rendah							
2.16.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Barang Milik Daerah					12	14.383.000	3	4.888.750							3	4.888.750	25.00	33.99					Dinas Komunikasi dan Informatika	

2.16.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD					5	14.383.000	1	4.888.750							1	4.888.750	5.00	33.99					Dinas Komunikasi dan Informatika	
																Rata-Rata Capaian Sub Kegiatan:			5.00	33.99						
																Predikat Capaian Sub Kegiatan:			Sangat Rendah	Sangat Rendah						
2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai Yang terfasilitasi pelayanan administrasi kepegawaia					100	258.496.000	100	163.246.000							100	163.246.000	100.00	63.15					Dinas Komunikasi dan Informatika	
2.16.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan					37	21.600.000	0	0							0	0	0.00	0.00					Dinas Komunikasi dan Informatika	
2.16.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan					45	172.486.000	45	163.246.000							45	163.246.000	25.00	94.64					Dinas Komunikasi dan Informatika	
2.16.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan					11	64.410.000	0	0							0	0	0.00	0.00					Dinas Komunikasi dan Informatika	
																Rata-Rata Capaian Sub Kegiatan:			8.33	31.55						
																Predikat Capaian Sub Kegiatan:			Sangat Rendah	Sangat Rendah						
2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah					12	386.006.600	3	54.720.776							3	54.720.776	25.00	14.18					Dinas Komunikasi dan Informatika	
2.16.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					3	114.028.600	0	21.988.496							0	21.988.496	0.00	19.28					Dinas Komunikasi dan Informatika	
2.16.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan					40	51.291.000	11	12.041.000							11	12.041.000	27.50	23.48					Dinas Komunikasi dan Informatika	

2.16.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan					15	19.241.000	7	12.010.780							7	12.010.780	46.67	62.42					Dinas Komunikasi dan Informatika	
2.16.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					65	201.446.000	6	8.680.500							6	8.680.500	4.62	4.31					Dinas Komunikasi dan Informatika	
																			19.70	27.37						
																			Sangat Rendah	Sangat Rendah						
2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Bulan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					12	167.400.000	3	39.900.000							3	39.900.000	25.00	23.84					Dinas Komunikasi dan Informatika	
2.16.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan					1	167.400.000	1	39.900.000							1	39.900.000	100.00	23.84					Dinas Komunikasi dan Informatika	
																			100.00	23.84						
																			Sangat Tinggi	Sangat Rendah						
2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah					12	117.153.800	3	25.302.146							3	25.302.146	25.00	21.60					Dinas Komunikasi dan Informatika	
2.16.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat					16	39.822.000	4	9.882.937							4	9.882.937	25.00	24.82					Dinas Komunikasi dan Informatika	
2.16.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					16	3.767.000	4	100.572							4	100.572	25.00	2.67					Dinas Komunikasi dan Informatika	
2.16.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					16	73.564.800	4	15.318.637							4	15.318.637	25.00	20.82					Dinas Komunikasi dan Informatika	

																	Rata-Rata Capaian Sub Kegiatan:				25.00	16.10						
																	Predikat Capaian Sub Kegiatan:				Sangat Rendah	Sangat Rendah						
2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan pemeliharaan barang milik daerah					12	310.278.500	3	115.644.900								3	115.644.900	25.00	37.27						Dinas Komunikasi dan Informatika	
2.16.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya					5	181.856.000	5	24.644.900								5	24.644.900	100.00	13.55						Dinas Komunikasi dan Informatika	
2.16.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					1	99.602.500	0	84.500.000								0	84.500.000	0.00	84.84						Dinas Komunikasi dan Informatika	
2.16.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					18	28.820.000	10	6.500.000								10	6.500.000	55.56	22.55						Dinas Komunikasi dan Informatika	
																	Rata-Rata Capaian Sub Kegiatan:				51.85	40.31						
																	Predikat Capaian Sub Kegiatan:				Rendah	Sangat Rendah						
																	Rata-Rata Capaian Kegiatan:				37.50	29.55						
																	Predikat Capaian Kegiatan:				Sangat Rendah	Sangat Rendah						

2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					100	3.679.311.250	0	906.348.916							0	906.348.916	0.00	24.63					Dinas Komunikasi dan Informatika	
2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase analisis berita yang berkonten positif					87	3.679.311.250	91,48	906.348.916							91,48	906.348.916	52.57	24.63					Dinas Komunikasi dan Informatika	
2.16.02.2.01.14	Relasi Media	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media					12	2.677.536.300	4	706.567.929							4	706.567.929	33.33	26.39					Dinas Komunikasi dan Informatika	
2.16.02.2.01.17	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan					84	830.804.000	37	163.129.687							37	163.129.687	44.05	19.64					Dinas Komunikasi dan Informatika	
2.16.02.2.01.23	Penyusunan Konten	Jumlah Konten Informasi Publik					1000	170.970.950	748	36.651.300							748	36.651.300	74.80	21.44					Dinas Komunikasi dan Informatika	
															Rata-Rata Capaian Sub Kegiatan:			50.73	22.49							
															Predikat Capaian Sub Kegiatan:			Sangat Rendah	Sangat Rendah							
															Rata-Rata Capaian Kegiatan:			52.57	24.63							
															Predikat Capaian Kegiatan:			Rendah	Sangat Rendah							

2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Tingkat Kematangan Teknologi Informasi dan Komunikasi					4,8	3.858.596.050	0	353.168.839							0	353.168.839	0.00	9.15					Dinas Komunikasi dan Informatika	
2.16.03.2.02	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perangkat daerah yang menggunakan sub domain cimahikota.go.id yang dikelola dan terkoneksi dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah					90	3.858.596.050	100	353.168.839							100	353.168.839	111.11	9.15					Dinas Komunikasi dan Informatika	
2.16.03.2.02.15	Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda					1	182.496.700	0	7.949.290							0	7.949.290	0.00	4.36					Dinas Komunikasi dan Informatika	
2.16.03.2.02.16	Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen keterhubungan pusat kendali dengan Pusat Data Nasional					1	189.156.150	1	11.735.990							1	11.735.990	50.00	6.20					Dinas Komunikasi dan Informatika	
2.16.03.2.02.20	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah					3	535.297.000	0	120.596.855							0	120.596.855	0.00	22.53					Dinas Komunikasi dan Informatika	
2.16.03.2.02.21	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah					1	15.807.000	1	1.512.000							1	1.512.000	100.00	9.57					Dinas Komunikasi dan Informatika	
2.16.03.2.02.24	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota					30	2.787.409.300	30	210.324.704							30	210.324.704	100.00	7.55					Dinas Komunikasi dan Informatika	
2.16.03.2.02.27	Implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten atau Kota Cerdas	Jumlah implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten/Kota Cerdas					15	148.429.900	0	1.050.000							0	1.050.000	0.00	0.71					Dinas Komunikasi dan Informatika	

																Rata-Rata Capaian Sub Kegiatan:			41.67	8.48						
																Predikat Capaian Sub Kegiatan:			Sangat Rendah	Sangat Rendah						
																Rata-Rata Capaian Kegiatan:			111.11	9.15						
																Predikat Capaian Kegiatan:			Sangat Tinggi	Sangat Rendah						
																Rata-Rata Capaian Program:			0.00	19.21						
																Predikat Capaian Program:			Sangat Rendah	Sangat Rendah						
2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK																									
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki ketersediaan data statistik sesuai dengan prinsip satu data					100	372.893.750	100	64.884.174							0	64.884.174	100.00	17.40					Dinas Komunikasi dan Informatika	
2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah ketersediaan data statistik sektoral yang memenuhi standar data					325	372.893.750	0	64.884.174							0	64.884.174	0.00	17.40					Dinas Komunikasi dan Informatika	
2.20.02.2.01.07	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik					180	63.179.000	60	0							60	0	33.33	0.00					Dinas Komunikasi dan Informatika	
2.20.02.2.01.10	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata					20	309.714.750	5	64.884.174							5	64.884.174	25.00	20.95					Dinas Komunikasi dan Informatika	
																Rata-Rata Capaian Sub Kegiatan:			29.17	10.47						
																Predikat Capaian Sub Kegiatan:			Sangat Rendah	Sangat Rendah						

																Rata-Rata Capaian Kegiatan:			0.00	17.40						
																Predikat Capaian Kegiatan:			Sangat Rendah	Sangat Rendah						
																Rata-Rata Capaian Program:			100.00	17.40						
																Predikat Capaian Program:			Sangat Tinggi	Sangat Rendah						
2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN																									
2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan layanan persandian dalam rangka pengamanan informasi milik pemerintah					100	563.481.000	100	260.508.160							0	260.508.160	100.00	46.23					Dinas Komunikasi dan Informatika	
2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ASN yang telah menggunakan sertifikat elektronik					4	333.557.000	49	57.235.600							49	57.235.600	306.25	17.16					Dinas Komunikasi dan Informatika	
2.21.02.2.01.02	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					3	144.526.000	0	18.261.200							0	18.261.200	0.00	12.64					Dinas Komunikasi dan Informatika	
2.21.02.2.01.04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi					25	189.031.000	30	38.974.400							30	38.974.400	60.00	20.62					Dinas Komunikasi dan Informatika	
																Rata-Rata Capaian Sub Kegiatan:			30.00	16.63						
																Predikat Capaian Sub Kegiatan:			Sangat Rendah	Sangat Rendah						

2.21.02.2.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik Pola Hubungan Komunikasi Sandi (PHKS) yang diterapkan pemerintah daerah berdasarkan pola hubungan komunikasi sandi						20	229.924.000	30	203.272.560						30	203.272.560	150.00	88.41						Dinas Komunikasi dan Informatika	
2.21.02.2.02.01	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi						10	229.924.000	30	203.272.560						30	203.272.560	150.00	88.41						Dinas Komunikasi dan Informatika	
																Rata-Rata Capaian Sub Kegiatan:			150.00	88.41							
																Predikat Capaian Sub Kegiatan:			Sangat Tinggi	Tinggi							
																Rata-Rata Capaian Kegiatan:			228.13	52.78							
																Predikat Capaian Kegiatan:			Sangat Tinggi	Rendah							
																Rata-Rata Capaian Program:			100.00	46.23							
																Predikat Capaian Program:			Sangat Tinggi	Sangat Rendah							

Dalam mencapai tujuan dan sasaran kinerja kegiatan sampai dengan triwulan I tahun 2025 dipengaruhi oleh berbagai faktor pendorong dan faktor penghambat yang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.3.2 Faktor Pendorong dan Penghambat Kinerja

Analisis Faktor Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/Kota Renja Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten/Kota Cimahi Periode Pelaksanaan: 2025 Triwulan: 1				
Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Tindak Lanjut
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Komitmen pimpinan dalam upaya mendorong peningkatan kompetensi seluruh pegawai melalui penyelenggaraan bimtek baik secara internal maupun melalui lembaga-lembaga lainnya	saat ini belum adanya ketetapan menpan terkait anjab untuk jabatan fungsional yang ada di diskominfo	Melakukan analisis jabatan kebutuhan jafung yang menjadi kewenangan diskominfo untuk diusulkan guna mendapat rekomendasi sebagai dasar penetapan
2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedia aturan dan pedoman yang memadai dalam penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	SDM yang menangani perencanaan dari segi kuantitas masih harus ditambah	Mengusulkan penambahan SDM yang memiliki kompetensi dalam perencanaan
		Adanya aturan dan pedoman penyusunan dokumen perencanaan jangka pendek PD	ketersediaan Sumber Daya Manusia terbatas	
		Adanya dukungan pimpinan , aturan yang jelas serta ketersediaan sistem infromasi dalam melakukan evaluasi kinerja	konsistensi dan validitas data capaian kinerja masih perlu ditingkatkan kualitasnya	Menyusun SOP pengumpulan data

2.16.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedia aturan dan pedoman yang memadai dalam penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	SDM yang menangani perencanaan dari segi kuantitas masih harus ditambah	Mengusulkan penambahan SDM yang memiliki kompetensi dalam perencanaan
2.16.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Adanya aturan dan pedoman penyusunan dokumen perencanaan jangka pendek PD	ketersediaan Sumber Daya Manusia terbatas	
2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketersediaan anggaran memadai untuk penyediaan gaji	Penyediaan gaji dapat dilaksanakan sesuai dengan target	
		Pelaksanaan penatausahaan keuangan dilakukan melalui aplikasi	aplikasi pengelolaan keuangan masih perlu ditingkatkan agar lebih optimal	
2.16.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Ketersediaan anggaran memadai untuk penyediaan gaji	Penyediaan gaji dapat dilaksanakan sesuai dengan target	
2.16.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan penatausahaan keuangan dilakukan melalui aplikasi	aplikasi pengelolaan keuangan masih perlu ditingkatkan agar lebih optimal	
2.16.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dukungan anggaran aturan cukup memadai	terdapat beberapa kendaraan yang digunakan perlu dilakukan penggantian	
2.16.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dukungan anggaran aturan cukup memadai	terdapat beberapa kendaraan yang digunakan perlu dilakukan penggantian	Mengusulkan penggantian kendaraan dinas
2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Ketersediaan anggaran yang memadai untuk melaksanakan sosialisasi	dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana	
		Penyediaan pakaian dinas tidak dilaksanakan karena dialihkan untuk membiayai prioritas lain	Penyediaan pakaian dinas tidak dilaksanakan karena dialihkan untuk membiayai prioritas lain	

		Dilakukan rasionalisasi anggaran untuk bintek, peningkatan kapasitas menggunakan metode lain yang tidak menggunakan anggaran	Dilakukan rasionalisasi anggaran untuk bintek, peningkatan kapasitas menggunakan metode lain yang tidak menggunakan anggaran	
2.16.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Penyediaan pakaian dinas tidak dilaksanakan karena dialihkan untuk membiayai prioritas lain	Penyediaan pakaian dinas tidak dilaksanakan karena dialihkan untuk membiayai prioritas lain	
2.16.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Dilakukan rasionalisasi anggaran untuk bintek, peningkatan kapasitas menggunakan metode lain yang tidak menggunakan anggaran	Dilakukan rasionalisasi anggaran untuk bintek, peningkatan kapasitas menggunakan metode lain yang tidak menggunakan anggaran	
2.16.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Ketersediaan anggaran yang memadai untuk melaksanakan sosialisasi	dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana	
2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	pengadaan dapat dilaksanakan melalui metode e-purchasing	standar harga lebih rendah dibandingkan dengan harga pasaran	
		Natura 6 paket, mamin rapat 4, mamin tamu 1	penyediaan mamin rapat dan tamu disesuaikan dengan kebutuhan	
		ketersediaan anggaran cukup memadai untuk melaksanakan kegiatan	ketersediaan anggaran cukup memadai untuk melaksanakan kegiatan	
		anggaran cukup memadai sesuai dengan rencana	dilakukan pergeseran sesuai kebijakan nasional	
2.16.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	pengadaan dapat dilaksanakan melalui metode e-purchasing	standar harga lebih rendah dibandingkan dengan harga pasaran	

2.16.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Natura 6 paket, mamin rapat 4, mamin tamu 1	penyediaan mamin rapat dan tamu disesuaikan dengan kebutuhan	
2.16.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	ketersediaan anggaran cukup memadai untuk melaksanakan kegiatan	ketersediaan anggaran cukup memadai untuk melaksanakan kegiatan	
2.16.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	anggaran cukup memadai sesuai dengan rencana	dilakukan pergeseran sesuai kebijakan nasional	
2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	pengelolaan surat telah menggunakan aplikasi	penyediaan anggaran untuk THL pengelola surat masih belum dianggarkan 12 bulan	
		dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana	pembayaran jasa komunikasi dan listrik menyesuaikan dengan kebutuhan	
		ketersediaan anggaran, aturan cukup memadai	dapat dilaksanakan sesuai dengan target	
2.16.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	pengelolaan surat telah menggunakan aplikasi	penyediaan anggaran untuk THL pengelola surat masih belum dianggarkan 12 bulan	
2.16.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana	pembayaran jasa komunikasi dan listrik menyesuaikan dengan kebutuhan	
2.16.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	ketersediaan anggaran, aturan cukup memadai	dapat dilaksanakan sesuai dengan target	
2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	anggaran untuk pemeliharaan bbm dan servis kendaraan dinas	dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana	
		anggaran perbaikan toilet akan dilaksanakan pada bulan agustus	anggaran perbaikan toilet akan dilaksanakan pada bulan agustus	

		perbaikan komputer sebanyak 10 unit sudah dilakanakan sesuai rencana	perlu dilakukan penambahan anggaran untuk perbaikan komputer/laptop	
2.16.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	anggaran untuk pemeliharaan bbm dan servis kendaraan dinas	dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana	
2.16.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	anggaran perbaikan toilet akan dilaksanakan pada bulan agustus	anggaran perbaikan toilet akan dilaksanakan pada bulan agustus	
2.16.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	perbaikan komputer sebanyak 10 unit sudah dilakanakan sesuai rencana	perlu dilakukan penambahan anggaran untuk perbaikan komputer/laptop	
2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	pengadaan kendaraan dinas untuk kepala perangkat daerah melalui penyediaan sewa dianggarkan untuk 1 tahun	proses administrasi pengadaan membuntuhkan waktu lama sehingga pengadaan sewa mobil baru dapat dilaksanakan pada bulan ke 2	
2.16.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	pengadaan kendaraan dinas untuk kepala perangkat daerah melalui penyediaan sewa dianggarkan untuk 1 tahun	proses administrasi pengadaan membuntuhkan waktu lama sehingga pengadaan sewa mobil baru dapat dilaksanakan pada bulan ke 2	

2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Terdapat berbagai media baik internal maupun eksternal yang digunakan dalam penyebarluasan informasi publik	koordinasi yang harus lebih ditingkatkan dengan perangkat daerah terkait konten informasi publik yang membutuhkan publikasi secara luas sebagai bagian dari program prioritas pembangunan Kota Cimahi	
2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	"1. Kurang Kegiatan OPD yang akan di publikasikan masih belum maksimal (Kegiatan yang sudah di jadwalkan sebagai kegiatan strategis pemerintah daerah masih berubah dan kurangnya koordinasi dari OPD) 2. Tidak semua OPD suka publikasi (sehingga kegiatan-kegiatan OPD yang mendukung program pemerintah yang seharusnya di publikasikan tidak tersampaikan secara baik) 3. OPD belum maksimal dalam pemberian informasi/bahan publikasi terkait kegiatan"	"1. layanan terkait advetorial (pemberitaan) di media massa (TV, media online, radio, Surat Kabar), iklan display, artikel dari media 2. untuk Idul fitri 2025 pemerintah kota melalui diskominfo berkontribusi dalam pelaksanaan pemberian 2 iklan display kepada 117 media yang sudah teregistrasi (Iklan display nuzulul quran dan idul fitri) 3. registrasi media sampai Tw 1 sebanyak 117 media yang terlibat dengan kegiatan di cimahi termasuk media di luar Cimahi 4. Mendorong OPD untuk lebih terbuka/ kooperatif dalam memberikan informasi kegiatan OPD agar bisa di publikasikan pada kanal-kanal publikasi yang ada"	

		Tingkat pengetahuan masyarakat tentang layanan permohonan informasi dan pengaduan berbasis digital pada aplikasi SIMPONI dan SP4N LAPOR dan kanal resmi lainnya mulai mengalami peningkatan yang signifikan sehingga jumlah permohonan dan pengaduan ataupun penyampaian aspirasi cukup mengalami peningkatan	Faktor eksternal seperti "sering down" aplikasi SP4N LAPOR yang dikelola oleh Kementerian PAN-RB menjadi salah satu kendala yang terjadi pada triwulan pertama 2025 yang menyebabkan proses dari verifikasi dan tindak lanjut laporan pengaduan ataupun penyampaian aspirasi menjadi terhambat faktor penghambat lainnya adalah belum termutahirkannya daftar informasi publik yang ada pada setiap perangkat daerah di Kota Cimahi, sehingga perangkat daerah masih melakukan koordinasi terkait sifat Informasi Publik	
		Meningkatnya kolaborasi dan koordinasi antar perangkat daerah di Kota Cimahi sehingga bahan publikasi untuk media internal, dapat tersedia secara real time, hal ini mengakibatkan publikasi informasi dapat dilaksanakan secepat mungkin. Selain itu bertambahnya kanal media sosial resmi kota Cimahi (TikTok dan Cimahi Saber Hoaks) membuat diseminasi informasi kepada masyarakat bisa dilaksanakan secara lebih masif lagi.	Belum optimalnya peran kelompok informasi masyarakat sebagai mitra resmi komunikasi dua arah antara pemerintah kota Cimahi dengan masyarakat hingga level RW dan RT, sebagai salah satu wadah distribusi informasi yang diharapkan dapat membantu Pemerintah Kota Cimahi untuk mendistribusikan informasi hingga tingkat akar rumput (RT/RW)	

2.16.02.2.01.14	Relasi Media	"1. Kurang Kegiatan OPD yang akan di publikasikan masih belum maksimal (Kegiatan yang sudah di jadwalkan sebagai kegiatan strategis pemerintah daerah masih berubah dan kurangnya koordinasi dari OPD) 2. Tidak semua OPD suka publikasi (sehingga kegiatan-kegiatan OPD yang mendukung program pemerintah yang seharusnya di publikasikan tidak tersampaikan secara baik) 3. OPD belum maksimal dalam pemberian informasi/bahan publikasi terkait kegiatan"	"1.layanan terkait advetorial (pemberitaan) di media massa (TV, media online, radio, Surat Kabar), iklan display, artikel dari media 2. untuk Idul fitri 2025 pemerintah kota melalui diskominfo berkontribusi dalam pelaksanaan pemberian 2 iklan display kepada 117 media yang sudah teregistrasi (Iklan display nuzulul quran dan idul fitri) 3. resgistrasi media sampai Tw 1 sebanyak 117 media yang terlibat dengan kegiatan di cimahi termasuk media di luar Cimahi 4. Mendorong OPD untuk lebih terbuka/ kooperatif dalam memberikan informasi kegiatan OPD agar bisa di publikasikan pada kanal-kanal publikasi yang ada"	
-----------------	--------------	---	--	--

2.16.02.2.01.17	Pelayanan Informasi Publik	Tingkat pengetahuan masyarakat tentang layanan permohonan informasi dan pengaduan berbasis digital pada aplikasi SIMPONI dan SP4N LAPOR dan kanal resmi lainnya mulai mengalami peningkatan yang signifikan sehingga jumlah permohonan dan pengaduan ataupun penyampaian aspirasi cukup mengalami peningkatan	Faktor eksternal seperti "sering down" aplikasi SP4N LAPOR yang dikelola oleh Kementerian PAN-RB menjadi salah satu kendala yang terjadi pada triwulan pertama 2025 yang menyebabkan proses dari verifikasi dan tindak lanjut laporan pengaduan ataupun penyampaian aspirasi menjadi terhambat faktor penghambat lainnya adalah belum termutakhirkannya daftar informasi publik yang ada pada setiap perangkat daerah di Kota Cimahi, sehingga perangkat daerah masih melakukan koordinasi terkait sifat Informasi Publik	
2.16.02.2.01.23	Penyusunan Konten	Meningkatnya kolaborasi dan koordinasi antar perangkat daerah di Kota Cimahi sehingga bahan publikasi untuk media internal, dapat tersedia secara real time, hal ini mengakibatkan publikasi informasi dapat dilaksanakan secepat mungkin. Selain itu bertambahnya kanal media sosial resmi kota Cimahi (TikTok dan Cimahi Saber Hoaks) membuat diseminasi informasi kepada masyarakat bisa dilaksanakan secara lebih masif lagi.	Belum optimalnya peran kelompok informasi masyarakat sebagai mitra resmi komunikasi dua arah antara pemerintah kota Cimahi dengan masyarakat hingga level RW dan RT, sebagai salah satu wadah distribusi informasi yang diharapkan dapat membantu Pemerintah Kota Cimahi untuk mendistribusikan informasi hingga tingkat akar rumput (RT/RW)	

2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Ketersediaan dukungan anggaran, aturan dalam penyelenggaraan teknologi informasi dan komunikasi di Kota Cimahi	Pengukuran tingkat kematangan dilakukan di akhir tahun	
2.16.03.2.02	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	anggaran cukup, komitmen pimpinan, terkait dengan visi dan misi wali kota	jadwal pemantauan di bulan september, tetapi penganggaran di awal	
		Aanggaran cukup, komitmen pimpinan, terkait dengan visi dan misi wali kota	tidak ada permasalahan yang signifikan	
		adanya regulasi yang mendukung terkait pembangunan portal layanan baik layanan publik maupun adminstrasi sehingga memudahkan dalam mengkoordinasikan PD sebagai pengelola aplikasi layanan publik dan administrasi	pengadaan sooftware tool untuk pembangunan dan pengembangan aplikasi d mana software tsbb merupakan produk inpor dan hasil survey tidak ada penyedia yang dapat menyediakan produk tsb. Hasil koordinasi dengan tim TKDN Kota Clmahi untuk menggunakan produk impor melalui mekanisme pengadaan langsung	
		adanya regulasi spbe kaitan dengan integrasi aplikasi (integrasi antara sistem kepegawaian dan keuangan dengan sistem bank BJB dalam rangka peningkatan layanan ASN menggunakan sistem pengubung layanan)	kesiapan perangkat daerah masih belum sepenuhnya dapat mendukung penyelenggaraan inetgrasi aplikasi yang dikelola	

		Listrik sudah diperbaiki hingga mencukupi kebutuhan daya	Belanja modal jaringan ada perangkat import yang sebelum masuk e-catalog harus lulus uji pengujian postel dari Komdigi. Masih dalam proses pengujian, blm ada progres. Sehingga realisasi terhambat	
		Kegiatan akan dilaksanakan pada akhir tahun	kurang rewarad terhadap inovator sehingga mengakibatkan kurangnya inovator di perangkat daerah	
2.16.03.2.02.15	Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	anggaran cukup, komitmen pimpinan, terkait dengan visi dan misi wali kota	jadwal pemantauan di bulan september, tetapi penganggaran di awal	
2.16.03.2.02.16	Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah	Aanggaran cukup, komitmen pimpinan, terkait dengan visi dan misi wali kota	tidak ada permasalahan yang signifikan	
2.16.03.2.02.20	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	adanya regulasi yang mendukung terkait pembangunan portal layanan baik layanan publik maupun adminstrasi sehingga memudahkan dalam mengkoordinasikan PD sebagai pengelola aplikasi layanan publik dan administrasi	pengadaan sooftware tool untuk pembangunan dan pengembangan aplikasi d mana software tsbb merupakan produk inpor dan hasil survey tidak ada penyedia yang dapat menyediakan produk tsb. Hasil koordinasi dengan tim TKDN Kota Clmahi untuk menggunakan produk impor melalui mekanisme pengadaan langsung	

2.16.03.2.02.21	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	adanya regulasi spbe kaitan dengan integrasi aplikasi (integrasi antara sistem kepegawaian dan keuangan dengan sistem bank BJB dalam rangka peningkatan layanan ASN menggunakan sistem penghubung layanan)	kesiapan perangkat daerah masih belum sepenuhnya dapat mendukung penyelenggaraan inetgrasi aplikasi yang dikelola	
2.16.03.2.02.24	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Listrik sudah diperbaiki hingga mencukupi kebutuhan daya	Belanja modal jaringan ada perangkat import yang sebelum masuk e-catalog harus lulus uji pengujian postel dari Komdigi. Masih dalam proses pengujian, blm ada progres. Sehingga realisasi terhambat	
2.16.03.2.02.27	Implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten atau Kota Cerdas	Kegiatan akan dilaksanakan pada akhir tahun	kurang rewarad terhadap inovator sehingga mengakibatkan kurangnya inovator di perangkat daerah	
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Tersedianya aturan yang jelas mengenai pengelolaan satu data indonesia serta telah tersedianya aplikasi dalam mendukung pengeloalaan data statistik sektoral melalui open data Jawa Barat	Kurangnya kesadaran dan pemahaman pada tingkat produsen data (perangkat daerah) dalam penyediaan data prioritas statitisik sektoral yang sesuai dengan prinsip satu data indonesia	

2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	5 CPNS baru bergabung di bidang statistik, layanan data sudah berjalan	kapasitas SDM, membutuhkan wadah kelembagaan utk masuk ke level bidang karena urusan cukup besar terkait data dan statistik, peningkatan kualitas data dan kemampuan SDM di perangkat daerah, membutuhkan jabatan statistisi dan prakom di perangkat daerah, PIC tiap PD kurang fokus dalam pengerjaan pengolahan data, baru 54% data kota terpublish, sisanya belum tergarap	
		Terdapat aturan, anggaran dan komitmen pimpinan dalam mendukung kegiatan statistik sektoral di Kota Cimahi	pemahaman masing2 PD thd statistik oleh PPTK bukan hanya PIC, survey, kompilasi dan pendataan lengkap, perlu dilakukan pembinaan lebih lanjut.	

2.20.02.2.01.07	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	5 CPNS baru bergabung di bidang statistik, layanan data sudah berjalan	kapasitas SDM, membutuhkan wadah kelembagaan utk masuk ke level bidang karena urusan cukup besar terkait data dan statistik, peningkatan kualitas data dan kemampuan SDM di perangkat daerah, membutuhkan jabatan statistisi dan prakom di perangkat daerah, PIC tiap PD kurang fokus dalam pengerjaan pengolahan data, baru 54% data kota terpublish, sisanya belum tergarap	
2.20.02.2.01.10	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	Terdapat aturan, anggaran dan komitmen pimpinan dalam mendukung kegiatan statistik sektoral di Kota Cimahi	pemahaman masing2 PD thd statistik oleh PPTK bukan hanya PIC, survey, kompilasi dan pendataan lengkap, perlu dilakukan pembinaan lebih lanjut.	
2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI			
2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan akan dilaksanakan pada bulan Juni	kegiatan baru akan dilaksanakan pada bulan Juni	
		Dibentuk PIC masing-masing PD dalam pengelolaan keamanan informasi	belum sepenuhnya terwujudnya kesadaran terhadap keamanan informasi di seluruh PD	

2.21.02.2.01.02	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan akan dilaksanakan pada bulan Juni	kegiatan baru akan dilaksanakan pada bulan Juni	
2.21.02.2.01.04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Dibentuk PIC masing-masing PD dalam pengelolaan keamanan informasi	belum sepenuhnya terwujudnya kesadaran terhadap keamanan informasi di seluruh PD	
2.21.02.2.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	pekerjaan sudah dilaksanakan sesuai jadwal	pekerjaan sudah dilaksanakan sesuai jadwal	
2.21.02.2.02.01	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	pekerjaan sudah dilaksanakan sesuai jadwal	pekerjaan sudah dilaksanakan sesuai jadwal	

Capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi sampai dengan triwulan I Tahun 2025 masih belum optimal mengingat pelaksanaan program dan kegiatan masih dalam tahap persiapan, selain itu terdapat kebijakan berupa Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 adalah peraturan yang dikeluarkan oleh Presiden untuk mengarahkan efisiensi anggaran di berbagai sektor baik di tingkat pusat maupun daerah. Menindaklanjuti hal tersebut Dinas Komunikasi dan Informatika melakukan efisiensi anggaran sesuai dengan instruksi tersebut sebesar Rp. 569.298.600 atau 3,39% dibandingkan anggaran sebelumnya, secara umum berikut analisis capaian kinerja sampai dengan triwulan I Tahun 2025.

Faktor Pendorong:

1. Komitmen dan keterlibatan pimpinan dalam pelaksanaan urusan tugas yang berorientasi pada outcome dan benefit dari mulai tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian secara terus menerus untuk memastikan ketercapaian kinerja pada setiap tingkatan.
2. Penambahan sumber daya manusia sebanyak 15 orang terdiri dari 11 orang CPNS dan 4 orang PPPK yang memiliki kompetensi sesuai dengan usulan sehingga dapat memenuhi kebutuhan organisasi yang selama ini menjadi kelemahan organisasi.
3. Terdapat regulasi yang lengkap dan jelas sampai dengan petunjuk teknis dan pedoman dari setiap urusan yang menjadi tanggungjawab Dinas Komunikasi dan Informatika.

Faktor Penghambat:

1. Peralatan TIK yang mudah usang dan rusak karena pemakaian yang tinggi sehingga menuntut pembaharuan peralatan (*hardware* dan *software*) yang cepat yang mengakibatkan perlunya dukungan anggaran yang besar.
2. Keterbatasan BSSN dalam memberikan layanan persandian maupun keamanan informasi kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten/Kota se Indonesia, khususnya Kota Cimahi yang berimplikasi terhadap waktu pelayanan yang diberikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika kepada perangkat daerah di Kota Cimahi seperti sandi data dan lainnya.

3. Belum tersusunnya jadwal dan daftar publikasi program prioritas dari Perangkat Daerah yang harus dipublikasikan kepada masyarakat

Tindaklanjut:

1. Melakukan pemeliharaan secara rutin dan mengajukan anggaran bagi peremajaan peralatan untuk mengoptimalkan penyelenggaraan layanan TIK bagi seluruh Perangkat Daerah dan unit lainnya lingkup Pemerintah Kota Cimahi.
2. Melakukan koordinasi dan konsultasi secara lebih dan menjalin hubungan baik untuk mendapatkan layanan yang cepat sehingga dapat meningkatkan kinerja.
3. Menunjuk PIC dan ditetapkan melalui Surat Keputusan Wali Kota di setiap Perangkat Daerah untuk memastikan seluruh program prioritas dapat terpublikasi secara luas melalui kanal yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi.

3.1. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Isu-isu penting terkait urusan yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi, sebagai berikut:

a. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya, Pemerintah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, yang telah mulai diterapkan secara bertahap sejak tahun 2018. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.

Misi SPBE adalah:

1. Melakukan penataan dan penguatan organisasi dan tata kelola sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu;
2. Mengembangkan pelayanan publik berbasis elektronik yang terpadu, menyeluruh, dan menjangkau masyarakat luas;
3. Membangun fondasi teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi, aman, dan andal; dan

4. Membangun SDM yang kompeten dan inovatif berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Tujuan SPBE adalah:

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel;
2. Mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya; dan
3. Mewujudkan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu.

Sasaran SPBE adalah:

1. Terwujudnya tata kelola dan manajemen SPBE yang efektif dan efisien;
2. Terwujudnya layanan SPBE yang terpadu dan berorientasi kepada pengguna;
3. Terselenggaranya infrastruktur SPBE yang terintegrasi; dan
4. Meningkatnya kapasitas SDM SPBE.

Menteri PANRB sebagai Ketua Tim Koordinasi bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan seluruh kegiatan dan aktivitas SPBE Nasional, mengkoordinasikan proses bisnis pemerintahan, menetapkan aplikasi umum serta menetapkan manajemen SDM, manajemen risiko dan manajemen perubahan. Dalam unsur-unsur SPBE, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bertanggung jawab pada perancangan dan pengimplementasian Arsitektur dan Peta Rencana SPBE pada domain Penyelenggaraan Pemerintahan, serta bertanggung jawab pada domain Layanan yang menyangkut urusan penyelenggaraan Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Layanan Publik Berbasis Elektronik.

Tingkat kematangan penyelenggaraan SPBE saat ini mencapai 4,02 melebihi target yang telah ditetapkan sebelumnya. Capaian ini menunjukkan penyelenggaraan SPBE berada pada tingkat kematangan baik.

Namun demikian terdapat beberapa permasalahan yang masih terjadi dan perlu diselesaikan untuk mengoptimalisasikan penyelenggaraan SPBE, antara lain:

Infrastruktur Teknologi

Infrastruktur teknologi masih belum memadai untuk mendukung SPBE, seperti kapasitas server yang tersedia, perangkat keras, dan perangkat lunak terkini.

Integrasi Sistem

Sistem Informasi yang digunakan belum sepenuhnya terintegrasi sehingga pertukaran data belum optimal.

Kompetensi Sumber Daya Manusia

Keterbatasan SDM yang memiliki keterampilan dalam teknologi informasi dan komunikasi (TIK) menjadi hambatan besar dalam implementasi SPBE.

Keamanan Data

Serangan siber, menjadi tantangan serius dalam penerapan SPBE yang efektif dan aman.

b. Indeks Pembangunan Statistik

Statistik mempunyai arti penting dalam penyusunan kebijakan pembangunan nasional. Kegiatan statistik dituntut untuk menghasilkan statistik yang berkualitas, cepat, dan beragam sesuai kebutuhan pengguna. Oleh karena itu dibutuhkan pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) untuk mengukur tingkat kematangan penyelenggaraan statistik instansi pemerintah. EPSS merupakan suatu penilan yang dilakukan oleh BPS secara sistematis melalui verifikasi dan validasi terhadap hasil penilaian mandiri untuk mengukur tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral meliputi:

- a. Pengukuran capaian kemajuan penyelenggaraan statistik sektoral pada instansi pusat maupun daerah.
- b. Peningkatan kualitas penyelenggaraan statistik sektoral pada instansi pusat maupun daerah.
- c. Peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang statistik pada instansi pusat maupun daerah.

Keluaran EPSS adalah Indeks Pembangunan Statistik (IPS), merupakan suatu indikator yang menggambarkan tingkat kematangan statistik sektoral.

Untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan, Pemerintah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Satu Data Indonesia merupakan kebijakan tata kelola Data pemerintah untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk.

Pengaturan Satu Data Indonesia bertujuan:

1. Memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman bagi Instansi Pusat dan Instansi Daerah dalam rangka penyelenggaraan tata kelola Data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan;
2. Mewujudkan ketersediaan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan;
3. Mendorong keterbukaan dan transparansi Data sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis pada Data; dan
4. Mendukung sistem statistik nasional sesuai peraturan perundang-undangan.

Satu Data Indonesia harus dilakukan berdasarkan prinsip:

1. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi Standar Data;
2. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memiliki Metadata;
3. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi kaidah Interoperabilitas Data; dan
4. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk.

Permasalahan-permasalahan dalam penyelenggaraan ststistik sektoral meliputi:

Ketersediaan data prioritas

Data ststistik sektoral prioritas belum tersedia secara lengkap, data yang tersedia seringkali tidak lengkap, tidak mutakhir, atau tidak relevan untuk mendukung perencanaan dan pengambilan keputusan.

Belum optimalnya koordinasi antar pengelola Satu Data lingkup Kota

Lemahnya koordinasi antara pengelola satu data hal ini berpengaruh terhadap ketersediaan data sektoral.

Dari permasalahan-permasalahan strategis yang masih terjadi perlu dilakukan hal-hal berikut:

1. Peningkatan kualitas dan kapasitas infrastruktur TIK melalui pemeliharaan dan peningkatan kapasitas server, pemeliharaan perangkat aktif, penambahan bandwidth untuk optimalisasi digitalisasi layanan publik.
2. Secara bertahap melakukan iteroperabilitas antar aplikasi melalui sistem penghubung layanan.
3. Meningkatkan kemandirian informasi baik melalui peningkatan SDM pengelola keamanan maupun penyediaan perangkat keamanan informasi.
4. Meningkatkan koordinasi antar lembaga pengelola data sektoral.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Sejalan dengan arah kebijakan pembangunan nasional, maka visi pembangunan nasional untuk tahun 2025-2029 sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 adalah:

“Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”

Upaya untuk mewujudkan visi ini adalah melalui 8 Misi Pembangunan (Asta Cita) yaitu:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan HAM. Memastikan nilai dasar bangsa menjadi fondasi pembangunan.
2. Memantapkan pertahanan dan kemandirian bangsa. Menjamin keamanan serta swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, digital, hijau, dan biru.
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan lapangan kerja. Mendukung kewirausahaan, industri kreatif, dan sektor agromaritim melalui koperasi.
4. Memperkuat SDM, sains, teknologi, kesehatan, olahraga, dan inklusi. Fokus pada pendidikan, gender, peran perempuan, pemuda, serta penyandang disabilitas.
5. Hilirisasi industri berbasis Sumber Daya Alam. Mendorong peningkatan nilai tambah sumber daya alam di dalam negeri.
6. Membangun dari desa untuk pemerataan dan penanggulangan kemiskinan. Memperkuat pemerataan pertumbuhan ekonomi di wilayah desa dan kota.
7. Reformasi politik, hukum, dan birokrasi dan pemberantasan korupsi. Memperkuat tata kelola pemerintahan serta menegakkan supremasi hukum.
8. Harmoni lingkungan, budaya dan toleransi. Mewujudkan kehidupan yang adil, makmur, dan berkelanjutan dengan menjaga alam, budaya, dan toleransi antar umat beragama.

Telaahan kebijakan nasional nasional RPJMN 2025-2029 terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika,

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 merupakan dokumen perencanaan pembangunan nasional yang memuat arah kebijakan, strategi, dan program prioritas pembangunan selama lima tahun. Dalam RPJMN tersebut, terdapat beberapa arah kebijakan dan sasaran pembangunan nasional yang secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika, antara lain:

1. Transformasi Digital Nasional

RPJMN 2025–2029 menempatkan transformasi digital sebagai salah satu pilar utama dalam mendukung efisiensi tata kelola pemerintahan, peningkatan daya saing ekonomi, dan pelayanan publik yang inklusif. Hal ini sejalan dengan peran Dinas Komunikasi dan Informatika dalam mengembangkan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), memfasilitasi digitalisasi layanan publik, serta memperkuat sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE).

2. Penguatan Infrastruktur Digital

Salah satu prioritas pembangunan adalah pemerataan infrastruktur digital hingga ke daerah-daerah, guna mengurangi kesenjangan akses internet dan mendorong konektivitas nasional. Dinas Kominfo di daerah, termasuk Kota Cimahi, berperan dalam memperkuat jaringan internet, membangun pusat data lokal, dan memastikan keterhubungan perangkat daerah dengan sistem jaringan terintegrasi.

3. Tata Kelola Pemerintahan yang Inklusif dan Transparan

RPJMN 2025–2029 mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang lebih terbuka, akuntabel, dan partisipatif melalui keterbukaan informasi publik. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menjadi salah satu mandat utama Dinas Kominfo dalam pengelolaan informasi dan dokumentasi publik (PPID).

4. Keamanan Siber dan Perlindungan Data

Isu keamanan informasi dan perlindungan data pribadi menjadi perhatian nasional yang tercermin dalam RPJMN 2025–2029. Dinas Kominfo bertanggung jawab dalam membangun sistem keamanan informasi pemerintah daerah, menyosialisasikan literasi keamanan digital, dan mendukung implementasi kebijakan perlindungan data pribadi di lingkungan perangkat daerah.

5. Peningkatan Literasi Digital Masyarakat

RPJMN juga menekankan pentingnya peningkatan kapasitas SDM melalui penguatan literasi digital masyarakat. Dinas Kominfo memiliki peran strategis dalam mengedukasi masyarakat terkait penggunaan teknologi digital secara bijak, produktif, dan aman, termasuk melalui program sosialisasi, pelatihan, dan kampanye digital.

a. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Barat

Pemerintah Provinsi Jawa Barat menetapkan arah pembangunan jangka menengah 2025–2029 melalui visi “**Jawa Barat Istimewa: Lembur Diurus, Kota Ditata.**” Visi ini mencerminkan tekad untuk memperkuat peran wilayah perdesaan (lembur) dan perkotaan (kota) secara berimbang, melalui pendekatan pembangunan yang adaptif, berkelanjutan, dan berbasis pada keunggulan lokal.

Untuk mewujudkan visi tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Barat menetapkan empat misi pembangunan sebagai arah kebijakan dan prioritas pembangunan jangka menengah 2025–2029, yaitu:

1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul;
2. Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan dan Investasi Berbasis Kearifan Lingkungan yang Tidak Eksploitatif;
3. Mengurangi Disparitas Pembangunan Daerah Perkotaan, Perdesaan, serta Miskin dan Kaya;
4. Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan sesuai dengan Prinsip Good and Clean Governance.

Misi ini menjadi kerangka arah pembangunan Jawa Barat Tahun 2025–2029, yang akan menjadi acuan dan pedoman bagi Kota Cimahi dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah, agar terintegrasi dengan pembangunan provinsi serta mendukung tercapainya tujuan pembangunan nasional secara berkelanjutan. Berikut adalah tabel keselarasan antara Misi Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029 dengan Misi Kota Cimahi Tahun 2025-2029:

Tabel 3.1 Keselarasan antara Misi Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029 dengan Misi Kota Cimahi Tahun 2025-2029

No	Misi Provinsi Jawa Barat	Misi Kota Cimahi	Keterkaitan/ Sinkronisasi
1	Misi 1: Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	Misi 1: Mewujudkan Kota Cimahi yang Maju dengan SDM yang Unggul, Agamis dan Berkarakter	Menekankan penguatan karakter, nilai keagamaan, dan peningkatan kualitas SDM untuk menciptakan masyarakat unggul dan berdaya saing.
2	Misi 2: Mengembangkan ekonomi kerakyatan dan investasi berbasis kearifan lingkungan yang tidak eksploitatif	Misi 2: Meningkatkan Pembangunan Ekonomi yang Produktif	Berfokus pada penguatan ekonomi daerah yang produktif, berdaya saing, dan berbasis potensi lokal secara berkelanjutan.
3	Misi 3: Mengurangi Disparitas Pembangunan Daerah Perkotaan, Perdesaan, serta Miskin dan Kaya	Misi 4: Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kondusifitas Kota yang Aman, Nyaman, dan Berkelanjutan; Misi 5: Meningkatkan Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat melalui Kolaborasi Antar Generasi	Berorientasi pada pemerataan pembangunan, pengurangan ketimpangan, penguatan perlindungan sosial, serta menjaga kualitas lingkungan secara berkelanjutan.
4	Misi 4: Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan sesuai dengan Prinsip Good and Clean Governance	Misi 3: Menjadikan Cimahi sebagai Kota Teladan dalam Tata Kelola Pemerintahan	Menekankan penguatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, transparan, akuntabel, dan berorientasi pelayanan publik.

Sumber: Hasil Analisis Bappelitbangda Kota Cimahi, 2025

b. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Infromatika secara langsung mendukung mendukung ketercapaian visi dan misi Kota Cimahi.

Adapun visi dan misi RPJMD Kota Cimahi Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

“CIMAHI MANTAP”

MELALUI KOLABORASI ANTAR GENERASI YANG MAJU, UNGGUL DAN BERKELANJUTAN

Visi Kota Cimahi Tahun 2025-2029 diuraikan sebagai berikut:

1. MAJU; Mewujudkan Pembangunan Kota Cimahi yang lebih maju di segala bidang
2. AGAMIS; Menciptakan kota yang agamis serta menjunjung tinggi nilai religius dan toleran
3. NYAMAN; Mewujudkan lingkungan asri dan berkelanjutan dengan fasilitas ruang ekspresi publik yang lebih representatif
4. TELADAN; Menjadikan Cimahi sebagai kota teladan dalam tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel dan berintegritas
5. AMAN; Mewujudkan lingkungan masyarakat yang damai, tertib dan teratur
6. PRODUKTIF; Meningkatkan daya kreativitas masyarakat yang produktif menuju masyarakat sejahtera

Dalam upaya perwujudan visi pembangunan jangka menengah Kota Cimahi Tahun 2025-2029 tersebut akan dicapai melalui 5 (lima) misi, sebagai berikut:

1. Mewujudkan Kota Cimahi yang Maju dengan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Agamis dan Berkarakter
2. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi yang Produktif
3. Menjadikan Cimahi sebagai Kota Teladan dalam Tata Kelola Pemerintahan
4. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kondusifitas Kota yang Aman, Nyaman dan Berkelanjutan.
5. Meningkatkan Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat melalui Kolaborasi Antar Generasi.

Asta Cita menjadi arah kebijakan strategis nasional yang bertujuan untuk mendorong transformasi pembangunan secara inklusif dan berkelanjutan, guna mewujudkan Indonesia sebagai negara maju pada tahun 2045. Sebagai tindak lanjut dari hal tersebut, Pemerintah Kota Cimahi telah menyelaraskan arah pembangunan daerah dengan Asta Cita Presiden agar implementasi pembangunan di daerah dapat mendukung pencapaian pembangunan nasional. Keselarasan ini tercermin dalam misi pembangunan Kota Cimahi Tahun 2025–2029 yang telah dirumuskan.

Berikut adalah tabel keselarasan antara Asta Cita Tahun 2025-2029 dengan Misi Kota Cimahi Tahun 2025-2029:

Tabel 3.2 Keselarasan antara Asta Cita Tahun 2025-2029 dengan Misi Kota Cimahi Tahun 2025-2029

No	Asta Cita	Misi Kota Cimahi	Keterkaitan/ Sinkronisasi
1	Asta Cita 1: Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)	Misi 1: Mewujudkan Kota Cimahi yang Maju dengan SDM yang Unggul, Agamis dan Berkarakter	Menekankan penguatan karakter, nilai kebangsaan, dan keberagaman dalam pembangunan SDM untuk mendukung masyarakat yang unggul dan berkarakter.
2	Asta Cita 2: Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Misi 4: Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kondusifitas Kota yang Aman, Nyaman dan Berkelanjutan	Terkait dalam aspek ketahanan lokal, keamanan sosial, dan pembangunan kawasan yang nyaman dan tertib untuk mewujudkan kota yang aman dan berkelanjutan.
3	Asta Cita 3: Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	Misi 2: Meningkatkan Pembangunan Ekonomi yang Produktif	Menekankan peningkatan produktivitas ekonomi daerah dan penciptaan lapangan kerja berkualitas sebagai langkah transformasi ekonomi.
4	Asta Cita 4: Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan	Misi 1: Mewujudkan Kota Cimahi yang Maju dengan SDM yang Unggul, Agamis dan Berkarakter	Mendukung pembangunan SDM secara inklusif melalui penguatan akses pendidikan, kesehatan, dan peran pemuda serta perempuan.

No	Asta Cita	Misi Kota Cimahi	Keterkaitan/ Sinkronisasi
	penyandang disabilitas		
5	Asta Cita 5: Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri	Misi 2: Meningkatkan Pembangunan Ekonomi yang Produktif	Mendukung penguatan hilirisasi dan nilai tambah ekonomi lokal dalam pembangunan ekonomi daerah.
6	Asta Cita 6: Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan	Misi 5: Meningkatkan Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat melalui Kolaborasi Antar Generasi	Menekankan pemerataan pembangunan wilayah dan pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat lintas generasi.
7	Asta Cita 7: Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Misi 3: Menjadikan Cimahi sebagai Kota Teladan dalam Tata Kelola Pemerintahan	Menekankan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik.
8	Asta Cita 8: Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	Misi 4: Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kondusifitas Kota yang Aman, Nyaman dan Berkelanjutan	Selaras dalam pelestarian lingkungan hidup, pengelolaan ruang yang berkelanjutan, dan penguatan toleransi antar masyarakat untuk mendukung pembangunan yang harmonis dan berkelanjutan.

Sumber: Hasil Analisis Bappelitbangda Kota Cimahi, 2025

Peran Dinas Komunikasi dan Infromatika dalam mendukung capain visi, misi Kota Cimahi melalui tujuan, sasaran dan target indikator utama (IKU) Tahun 2026 sebagai berikut:

Tabel 3.3. Matriks Misi, Tujuan, Sasaran dan Target Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2026

MISI	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
Menjadikan Cimahi sebagai Kota Teladan dalam Tata Kelola Pemerintahan	Terwujudnya transformasi layanan publik berbasis digital		Indeks Pemerintahan Digital	Indeks	2,12
		Mewujudkan Kota Cimahi Yang Informatif	Indeks Keterbukaan Infomasi	Indeks	62,51
		Terwujudnya transformasi digital Pemerintah	Indeks Pemerintahan Digital	Indeks	2,12
	Terwujudnya layanan statistik yang akurat dan dapat diandalkan	Meningkatnya kapasitas instansi pemerintah dalam mengelola dan memanfaatkan data untuk tata kelola yang transparan dan akuntabel.	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Indeks	3,03
	Meningkatnya keamanan informasi		Indeks SPBE/Indeks Pemerintahan Digital (terkait keamanan)	Indeks	1
		Meningkatnya keamanan sistem informasi dan infrastruktur teknologi informasi pemerintah daerah	Indeks KAMI	Indeks	589

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Pada Tahun Anggaran 2024 kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi secara umum rata melebihi target dengan rata-rata capaian sebesar 126,65%. Pencapaian Kinerja ini dicapai dengan komitmen bersama yang kuat dan kerja keras seluruh elemen organisasi dari mulai pucuk pimpinan hingga lapisan paling bawah.

Dengan lompatan capaian kinerja yang telah dicapai pada Tahun 2024 dipandang perlu untuk melakukan penyesuaian terget pada tahun perencanaan 2025. Penyesuaian target untuk rencan kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi dilakukan dengan telaahan dan analisis terlebih dahulu melalui reviu Rencana Strategis Tahun 2023-2026. Penyesuaian target dilakukan terhadap Indikator Kinerja Kunci dan Program sebagai berikut:

Hasil evaluasi terhadap capaian kinerja sasaran IKU Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024 dan rekomendasi dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) Tahun 2024 terdapat beberapa capaian yang melapaui target bahkan melebihi target rencana

tahun 2025, indikator kinerja utama yang telah melampaui target sebagai berikut:

Tabel 3.4. Perbandingan Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran							
				Pada Tahun Ke							
				2023		2024		2025		2026	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Meningkatkan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik	Meningkatnya tata kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3,00	4,02	4,10	4,15	4,15		4,15	
2	Meningkatkan penyelenggaraan implementasi keterbukaan informasi publik	Meningkatnya penyelenggaraan implementasi keterbukaan informasi publik	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	80%	90,48%	90,75%	93,64%	93,70%		93,75%	
3	Mewujudkan data statistik sektoral daerah yang berkualitas	Terwujudnya data statistik sektoral daerah yang berkualitas	Indeks Pembangunan Statistik	2	2,53	3	3,02	3,02		3,10	
4	Meningkatkan keamanan sistem informasi pemerintah daerah	Meningkatnya keamanan sistem informasi pemerintah daerah	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	351	409	410	534	535		550	
5	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Meningkatnya tata kelola pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	55	78,71	86,96	88,43	88,45		88,50	

Berdasarkan capaian tersebut, maka perlu dilakukan penyesuain rencana target untuk tahun anggaran 2024 s.d. 2026 sebagai berikut:

Tabel 3.5. Perubahan Target Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran							
				Pada Tahun Ke							
				2023		2024		2025		2026	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Meningkatkan Kualitas dan Inovasi Pelayanan Publik	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3,00	4,02	4,10	4,15	4,15		4,15	
			Indeks Keterbukaan Informasi Publik	80%	90,48%	90,75%	93,64%	93,7		93,75%	

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran							
				Pada Tahun Ke							
				2023		2024		2025		2026	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
			Indeks Pembangunan Statistik	2	2,53	3	3,02	3,02		3,10	
			Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	351	409	410	534	535		550	
			Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	55	86,93	86,96	88,43	88,45		88,50	

Selain perubahan IKU diskominfo, terdapat beberapa kinerja Program yang telah melampau target pada tahun 2024 sehingga dilakukan penyesuaian target sebagai berikut:

Tabel 3.6. Perubahan Terget Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi

No	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET			
				2023	2024	2025	2026
1	2		3	4	5	6	7
I	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Meningkatkan penyelenggaraan e-Government	Tingkat kematangan teknologi informasi dan Komunikasi (Nilai Indeks)	2,5	4,75	4,80	4,90
II	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Meningkatnya penyebarluasan informasi pembangunan daerah dan komunikasi publik yang efektif dan efisien	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebarluasan informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	60	100	100	100

No	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET			
				2023	2024	2025	2026
1	2		3	4	5	6	7
III	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Meningkatnya tata Kelola statistik sektoral daerah	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki ketersediaan data statistik sesuai dengan prinsip satu data	37	100	100	100
IV	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Meningkatnya keamanan informasi pemerintah daerah	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan layanan persandian dalam rangka pengamanan informasi milik pemerintah	33,33	100	100	100
V	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kinerja Organisasi	Nilai Sakip Perangkat Daerah	71	74,5	78	80
			Indeks Profesionalitas ASN	50	79,48	79,58	79,68
			Nilai IKM Perangkat Daerah	76,61	84,72	84,82	84,92

Pada tahun 2025 dilakukan tahapan penyusunan dokumen perencanaan jangka menengah RPJMD Kota Cimahi tahun 2025-2026 sebagai bagian dari upaya untuk mewujudkan visi misi kepala daerah terpilih. Sejalan dengan perubahan RPJMD Kota Cimahi, Dinas Komunikasi dan Informatika melakukan penyesuaian terhadap dokumen rencana strategis serta Rencana Kerja Perangkat Daerah guna menyelaraskan arah kebijakan tujuan dan sasaran agar dapat memberikan kontribusi terhadap tercapainya visi dan misi Kota Cimahi sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi. Berikut tujuan dan sasaran serta indikator Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis Dinas Tahun 2025-2029:

Tabel 3.7. Tujuan, Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi

MISI	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	2026	2027	2028	2029	2030
Menjadikan Cimahi sebagai Kota Teladan dalam Tata Kelola Pemerintahan	Terwujudnya transformasi layanan publik berbasis digital		Indeks Pemerintahan Digital	Indeks	2,12	2,4	2,6	2,65	2,7
		Mewujudkan Kota Cimahi Yang Informatif	Indeks Keterbukaan Infomasi	Indeks	62,51	75,51	81,26	82,26	83,26
		Terwujudnya transformasi digital Pemerintah	Indeks Pemerintahan Digital	Indeks	2,12	2,4	2,6	2,65	2,7
	Terwujudnya layanan statistik yang akurat dan dapat diandalkan	Meningkatnya kapasitas instansi pemerintah dalam mengelola dan memanfaatkan data untuk tata kelola yang transparan dan akuntabel.	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Indeks	3,03	3,03	3,05	3,05	3,08
	Meningkatnya keamanan informasi		Indeks SPBE/Indeks Pemerintahan Digital (terkait keamanan)	Indeks	1	1,5	2	2,5	3
		Meningkatnya keamanan sistem informasi dan infrastruktur teknologi informasi pemerintah daerah	Indeks KAMI	Indeks	589	590	595	600	610

3.3. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan dalam Perubahan

Untuk mendukung pelaksanaan dan implementasi program, kegiatan dan sub kegiatan yang sesuai dengan perencanaan pada perubahan anggaran tahun 2025 diperlukan pendanaan sebagai berikut:

- Jumlah anggaran belanja pada rencana kerja murni tahun 2025 sebesar Rp. 17.285.270.330,-
- Jumlah anggaran belanja pada APBD Murni tahun 2025 sebesar Rp. 16.793.569.564,-
- Jumlah anggaran belanja pada APBD parsial Tahun 2025 sebesar Rp. Nihil Rp. 16.224.270.964,-.
- Jumlah sub kegiatan yang direncanakan ditunda pelaksanaannya pada Perubahan APBD Tahun 2025 sebanyak nihil sub kegiatan.
- Jumlah sub kegiatan yang baru muncul pada Perubahan APBD Tahun 2025 sebanyak nihil sub kegiatan.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi Tahun 2025 memuat beberapa perubahan meliputi perubahan indikator kinerja, target kinerja serta pagu indikatif yang dapat dilihat lebih rinci pada tabel berikut:

Tabel 3.8. Rencana Kerja Perubahan Tahun Anggaran 2025 Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Cimahi

No	Kode					RENJA MURNI TAHUN 2025				PERUBAHAN RENJA TAHUN 2025				Selisih (Bertambah/Berkurang)	Keterangan
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Pagu Anggaran (RP)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Pagu Anggaran (RP)		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Dinas Komunikasi dan Informatika			16.793.569.564,00				16.298.750.964,00	-494.818.600,00	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			16.793.569.564,00	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			16.298.750.964,00	-494.818.600,00	
	2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			15.857.194.814,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			15.479.192.114,00	-378.002.700,00	
1	2	16	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Nilai IKM Perangkat Daerah Indeks Profesionalitas ASN	78 79,58 84,82	8.319.287.514,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Nilai IKM Perangkat Daerah Indeks Profesionalitas ASN	80,06 84,82 96	8.252.060.014,00	-67.227.500,00	
	2	16	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi yang disusun	100 Persen	443.515.000,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi yang disusun	100 Persen	443.515.000,00	0,00	
	2	16	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	104.970.000,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	53.988.000,00	-50.982.000,00	
	2	16	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16 Laporan	338.545.000,00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16 Laporan	338.545.000,00	0,00	
	2	16	01	2.01	0002					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				Sub Kegiatan baru sesuai dengan RENSTRA 2026-2030

No	Kode					RENJA MURNI TAHUN 2025				PERUBAHAN RENJA TAHUN 2025				Selisih (Bertambah/Berkurang)	Keterangan
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Pagu Anggaran (RP)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Pagu Anggaran (RP)		
	2	16	01	2.01	0004					Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD				Sub Kegiatan baru sesuai dengan RENSTRA 2026-2030
	2	16	01	2.01	0006					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				Sub Kegiatan baru sesuai dengan RENSTRA 2026-2030
	2	16	01	2.01	0008					Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				Sub Kegiatan baru sesuai dengan RENSTRA 2026-2030
	2	16	01	2.01	0009					Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah				Sub Kegiatan baru sesuai dengan RENSTRA 2026-2030
	2	16	01	2.01	0010					Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				Sub Kegiatan baru sesuai dengan RENSTRA 2026-2030

No	Kode					RENJA MURNI TAHUN 2025				PERUBAHAN RENJA TAHUN 2025				Selisih (Bertambah/Berkurang)	Keterangan
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Pagu Anggaran (RP)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Pagu Anggaran (RP)		
	2	16	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Keuangan Yang Disusun	12 Dokumen	6.622.054.614,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Keuangan Yang Disusun	12 Dokumen	6.622.054.614,00	0,00	
	2	16	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	34 Orang/bulan	6.607.760.114,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	34 Orang/bulan	6.712.020.114,00	104.260.000,00	
	2	16	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	18 Dokumen	14.294.500,00	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	18 Dokumen	14.294.500,00	0,00	
	2	16	01	2.02	0005					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				Sub Kegiatan baru sesuai dengan RENSTRA 2026-2030
	2	16	01	2.02	0007					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				Sub Kegiatan baru sesuai dengan RENSTRA 2026-2030
	2	16	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Barang Milik Daerah	12 Bulan	14.383.000,00	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Barang Milik Daerah	12 Bulan	14.383.000,00	0,00	
	2	16	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	5 Dokumen	14.383.000,00	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	5 Dokumen	14.383.000,00	0,00	
	2	16	01	2.03	0001					Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				Sub Kegiatan baru sesuai dengan

No	Kode					RENJA MURNI TAHUN 2025				PERUBAHAN RENJA TAHUN 2025				Selisih (Bertambah/Berkurang)	Keterangan
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Pagu Anggaran (RP)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Pagu Anggaran (RP)		
															RENSTRA 2026-2030
	2	16	01	2.03	0006					Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				Sub Kegiatan baru sesuai dengan RENSTRA 2026-2030
	2	16	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai Yang terfasilitasi pelayanan administrasi kepegawaia	100 Persen	258.496.000,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai Yang terfasilitasi pelayanan administrasi kepegawaia	100 Persen	258.496.000,00	0,00	
	2	16	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	37 Paket	21.600.000,00		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket	0,00	-21.600.000,00	
	2	16	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	45 Orang	172.486.000,00		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	54 Orang	170.686.000,00	-1.800.000,00	
	2	16	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	11 Orang	64.410.000,00		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	11 Orang	53.160.000,00	-11.250.000,00	
	2	16	01	2.05	0005					Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				Sub Kegiatan baru sesuai dengan RENSTRA 2026-2030

No	Kode					RENJA MURNI TAHUN 2025				PERUBAHAN RENJA TAHUN 2025				Selisih (Bertambah/Berkurang)	Keterangan
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Pagu Anggaran (RP)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Pagu Anggaran (RP)		
	2	16	01	2.05	0009					Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				Sub Kegiatan baru sesuai dengan RENSTRA 2026-2030
	2	16	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	12 Bulan	386.006.600,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	12 Bulan	386.006.600,00	0,00	
	2	16	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	114.028.600,00		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	168.024.600,00	53.996.000,00	
	2	16	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	40 Paket	51.291.000,00		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	40 Paket	54.058.000,00	2.767.000,00	
	2	16	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	15 Paket	19.241.000,00		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	15 Paket	19.241.000,00	0,00	
	2	16	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	65 Laporan	201.446.000,00		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	65 Laporan	100.723.000,00	-100.723.000,00	
	2	16	01	2.06	0001					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				Sub Kegiatan baru sesuai dengan RENSTRA 2026-2030
	2	16	01	2.06	0003					Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				Sub Kegiatan baru sesuai dengan

No	Kode					RENJA MURNI TAHUN 2025				PERUBAHAN RENJA TAHUN 2025				Selisih (Bertambah/Berkurang)	Keterangan
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Pagu Anggaran (RP)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Pagu Anggaran (RP)		
															RENSTRA 2026-2030
	2	16	01	2.06	0006					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				Sub Kegiatan baru sesuai dengan RENSTRA 2026-2030
	2	16	01	2.06	0008					Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				Sub Kegiatan baru sesuai dengan RENSTRA 2026-2030
	2	16	01	2.06	0010					Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				Sub Kegiatan baru sesuai dengan RENSTRA 2026-2030
	2	16	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Bulan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 bulan	167.400.000,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Bulan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 bulan	167.400.000,00	0,00	
	2	16	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	167.400.000,00	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	167.400.000,00	0,00	
	2	16	01	2.07	0002					Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				Sub Kegiatan baru sesuai dengan RENSTRA 2026-2030

No	Kode					RENJA MURNI TAHUN 2025				PERUBAHAN RENJA TAHUN 2025				Selisih (Bertambah/Berkurang)	Keterangan
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Pagu Anggaran (RP)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Pagu Anggaran (RP)		
	2	16	01	2.07	0005					Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				Sub Kegiatan baru sesuai dengan RENSTRA 2026-2030
	2	16	01	2.07	0006					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				Sub Kegiatan baru sesuai dengan RENSTRA 2026-2030
	2	16	01	2.07	0008					Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan				Sub Kegiatan baru sesuai dengan RENSTRA 2026-2030
	2	16	01	2.07	0009					Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				Sub Kegiatan baru sesuai dengan RENSTRA 2026-2030
	2	16	01	2.07	0010					Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				Sub Kegiatan baru sesuai dengan RENSTRA 2026-2030
	2	16	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	12 Bulan	117.153.800,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	12 Bulan	117.153.800,00	0,00	
	2	16	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	16 Laporan	39.822.000,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	16 Laporan	46.586.000,00	6.764.000,00	

No	Kode					RENJA MURNI TAHUN 2025				PERUBAHAN RENJA TAHUN 2025				Selisih (Bertambah/Berkurang)	Keterangan
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Pagu Anggaran (RP)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Pagu Anggaran (RP)		
	2	16	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	16 Laporan	3.767.000,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	16 Laporan	1.455.000,00	-2.312.000,00	
	2	16	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	16 Laporan	73.564.800,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	16 Laporan	81.963.800,00	8.399.000,00	
	2	16	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan pemeliharaan barang milik daerah	12 Bulan	310.278.500,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan pemeliharaan barang milik daerah	12 Bulan	310.278.500,00	0,00	
	2	16	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	181.856.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	144.152.000,00	-37.704.000,00	
	2	16	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	99.602.500,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	85.000.000,00	-14.602.500,00	
	2	16	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	18 Unit	28.820.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	18 Unit	26.380.000,00	-2.440.000,00	

No	Kode					RENJA MURNI TAHUN 2025				PERUBAHAN RENJA TAHUN 2025				Selisih (Bertambah/Berkurang)	Keterangan
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Pagu Anggaran (RP)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Pagu Anggaran (RP)		
	2	16	01	2.09	0001					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				Sub Kegiatan baru sesuai dengan RENSTRA 2026-2030
	2	16	01	2.09	0005					Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara				Sub Kegiatan baru sesuai dengan RENSTRA 2026-2030
	2	16	01	2.09	0006					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				Sub Kegiatan baru sesuai dengan RENSTRA 2026-2030
	2	16	01	2.09	0008					Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara				Sub Kegiatan baru sesuai dengan RENSTRA 2026-2030

No	Kode					RENJA MURNI TAHUN 2025				PERUBAHAN RENJA TAHUN 2025				Selisih (Bertambah/Berkurang)	Keterangan
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Pagu Anggaran (RP)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Pagu Anggaran (RP)		
2	2	16	02			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen	3.679.311.250,00	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen	3.590.015.000,00	-89.296.250,00	
	2	16	02	2.01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase analisis berita yang berkonten positif	87 Persen	3.679.311.250,00	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase analisis berita yang berkonten positif	87 Persen	3.679.311.250,00	0,00	
	2	16	02	2.01	0014	Relasi Media	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	12 Laporan	2.677.536.300,00	Relasi Media	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	12 Laporan	2.624.562.050,00	-52.974.250,00	
	2	16	02	2.01	0017	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	84 Permohonan	830.804.000,00	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	84 Permohonan	821.445.500,00	-9.358.500,00	
	2	16	02	2.01	0023	Penyusunan Konten	Jumlah Konten Informasi Publik	1000 Konten	170.970.950,00	Penyusunan Konten	Jumlah Konten Informasi Publik	1000 Konten	144.007.450,00	-26.963.500,00	
	2	16	02	2.01	0015					Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo				Sub Kegiatan baru sesuai dengan RENSTRA 2026-2030

No	Kode					RENJA MURNI TAHUN 2025				PERUBAHAN RENJA TAHUN 2025				Selisih (Bertambah/Berkurang)	Keterangan
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Pagu Anggaran (RP)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Pagu Anggaran (RP)		
	2	16	02	2.01	0019					Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah				Sub Kegiatan baru sesuai dengan RENSTRA 2026-2030
	2	16	02	2.01	0020					Diseminasi Informasi	Persentase khalayak yang terpapar informasi publik				Sub Kegiatan baru sesuai dengan RENSTRA 2026-2030
	2	16	02	2.01	0021					Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis				Sub Kegiatan baru sesuai dengan RENSTRA 2026-2030
	2	16	02	2.01	0022					Penyusunan Strategi Komunikasi Publik	Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun				Sub Kegiatan baru sesuai dengan RENSTRA 2026-2030
	2	16	02	2.01	0024					Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan				Sub Kegiatan baru sesuai dengan RENSTRA 2026-2030

No	Kode					RENJA MURNI TAHUN 2025				PERUBAHAN RENJA TAHUN 2025				Selisih (Bertambah/Berkurang)	Keterangan
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Pagu Anggaran (RP)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Pagu Anggaran (RP)		
3	2	16	03			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Tingkat Kematangan Teknologi Informasi dan Komunikasi	4,8 Nilai Indeks	3.858.596.050,00	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Tingkat Kematangan Teknologi Informasi dan Komunikasi	4,5 Nilai Indeks	3.637.117.100,00	904.678.660	
	2	16	03	2.02		Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perangkat daerah yang menggunakan sub domain cimahikota.go.id yang dikelola dan terkoneksi dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah	90 Persen	3.858.596.050,00	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perangkat daerah yang menggunakan sub domain cimahikota.go.id yang dikelola dan terkoneksi dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah	90 Persen	3.858.596.050,00	0,00	
	2	16	03	2.02	0015	Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	1 Laporan	182.496.700,00	Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	1 Laporan	111.674.800,00	-70.821.900,00	
	2	16	03	2.02	0016	Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen keterhubungan pusat kendali dengan Pusat Data Nasional	1 Dokumen	189.156.150,00	Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen keterhubungan pusat kendali dengan Pusat Data Nasional	1 Dokumen	174.389.400,00	-14.766.750,00	
	2	16	03	2.02	0020	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	3 Aplikasi	535.297.000,00	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	3 Aplikasi	502.858.900,00	-32.438.100,00	
	2	16	03	2.02	0021	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	1 Aplikasi	15.807.000,00	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	1 Aplikasi	11.237.100,00	-4.569.900,00	

No	Kode					RENJA MURNI TAHUN 2025				PERUBAHAN RENJA TAHUN 2025				Selisih (Bertambah/Berkurang)	Keterangan
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Pagu Anggaran (RP)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Pagu Anggaran (RP)		
	2	16	03	2.02	0024	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	30 Perangkat Daerah	2.787.409.300,00	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	30 Perangkat Daerah	2.734.199.800,00	-53.209.500,00	
	2	16	03	2.02	0027	Implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten atau Kota Cerdas	Jumlah implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten/Kota Cerdas	15 Program	148.429.900,00	Implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten atau Kota Cerdas	Jumlah implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten/Kota Cerdas	15 Program	102.757.100,00	-45.672.800,00	
	2	16	03	2.02	0025					Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi	Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional				Sub Kegiatan baru sesuai dengan RENSTRA 2026-2030
	2	16	03	2.02	0026					Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo				Sub Kegiatan baru sesuai dengan RENSTRA 2026-2030

No	Kode					RENJA MURNI TAHUN 2025				PERUBAHAN RENJA TAHUN 2025				Selisih (Bertambah/Berkurang)	Keterangan
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Pagu Anggaran (RP)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Pagu Anggaran (RP)		
	2	16	03	2.02	0032					Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE				Sub Kegiatan baru sesuai dengan RENSTRA 2026-2030
	2	16	03	2.02	0033					Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah	Jumlah laporan operasionalisasi pusat kendali				Sub Kegiatan baru sesuai dengan RENSTRA 2026-2030
	2	16	03	2.02	0034					Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interoperabilitas data dan integrasi layanan	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah				Sub Kegiatan baru sesuai dengan RENSTRA 2026-2030
	2	16	03	2.02	0035					Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	Jumlah laporan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE				Sub Kegiatan baru sesuai dengan RENSTRA 2026-2030

No	Kode					RENJA MURNI TAHUN 2025				PERUBAHAN RENJA TAHUN 2025				Selisih (Bertambah/Berkurang)	Keterangan
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Pagu Anggaran (RP)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Pagu Anggaran (RP)		
	2	16	03	2.02	0036					Penyediaan Akses Internet	Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas				Sub Kegiatan baru sesuai dengan RENSTRA 2026-2030
	2	16	03	2.02	0037					Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah				Sub Kegiatan baru sesuai dengan RENSTRA 2026-2030
	2	16	03	2.02	0038					Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas				Sub Kegiatan baru sesuai dengan RENSTRA 2026-2030
	2	20				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK									

No	Kode					RENJA MURNI TAHUN 2025				PERUBAHAN RENJA TAHUN 2025				Selisih (Bertambah/Berkurang)	Keterangan
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Pagu Anggaran (RP)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Pagu Anggaran (RP)		
4	2	20	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki ketersediaan data statistik sesuai dengan Prinsip Satu Data	100 persen	372.893.750,00	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki ketersediaan data statistik sesuai dengan Prinsip Satu Data	100 persen	284.975.850,00	-87.917.900,00	
	2	20	02	2.01		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah ketersediaan data statistik sektoral yang memenuhi standar data	325 Dataset	372.893.750,00	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah ketersediaan data statistik sektoral yang memenuhi standar data	325 Dataset	372.893.750,00	0,00	
	2	20	02	2.01	0007	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	180 Orang	63.179.000,00		Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	180 Orang	42.610.750,00	-20.568.250,00	
	2	20	02	2.01	0010	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata	20 Dokumen	309.714.750,00		Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata	20 Dokumen	242.365.100,00	-67.349.650,00	
	2	20	02	2.01	0017					Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik Nasional	Persentase kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik				Sub Kegiatan baru sesuai dengan RENSTRA 2026-2030
	2	20	02	2.01	0018					Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia	Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk				Sub Kegiatan baru sesuai dengan RENSTRA 2026-2030

No	Kode						RENJA MURNI TAHUN 2025				PERUBAHAN RENJA TAHUN 2025				Selisih (Bertambah/Berkurang)	Keterangan
							Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Pagu Anggaran (RP)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Pagu Anggaran (RP)		
	2	20	02	2.01	0019						Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data.				Sub Kegiatan baru sesuai dengan RENSTRA 2026-2030
	2	20	02	2.01	0020						Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik				Sub Kegiatan baru sesuai dengan RENSTRA 2026-2030
	2	20	02	2.01	0022						Koordinasi dan Kolaborasi Dalam Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Jumlah laporan penyelenggaraan forum satu data daerah				Sub Kegiatan baru sesuai dengan RENSTRA 2026-2030
	2	21				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN										
5	2	21	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan layanan persandian dalam rangka pengamanan informasi milik pemerintah	100 persen	563.481.000,00		PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan layanan persandian dalam rangka pengamanan informasi milik pemerintah	100 persen	534.583.000,00	-28.898.000,00	
	2	21	02	2.01		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ASN yang telah menggunakan sertifikat elektronik	4 Persen	333.557.000,00		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ASN yang telah menggunakan sertifikat elektronik	75 Persen	333.557.000,00	0,00	

No	Kode					RENJA MURNI TAHUN 2025				PERUBAHAN RENJA TAHUN 2025				Selisih (Bertambah/Berkurang)	Keterangan
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Pagu Anggaran (RP)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Pagu Anggaran (RP)		
	2	21	02	2.01	0002	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	3 Laporan	144.526.000,00	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	3 Laporan	122.652.000,00	-21.874.000,00	
	2	21	02	2.01	0004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	25 Perangkat Daerah	189.031.000,00	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	30 Perangkat Daerah	182.007.000,00	-7.024.000,00	
	2	21	02	2.01	0005					Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik				Sub Kegiatan baru sesuai dengan RENSTRA 2026-2030
	2	21	02	2.01	0006					Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan	Jumlah Laporan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan				Sub Kegiatan baru sesuai dengan RENSTRA 2026-2030

No	Kode					RENJA MURNI TAHUN 2025				PERUBAHAN RENJA TAHUN 2025				Selisih (Bertambah/Berkurang)	Keterangan
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Pagu Anggaran (RP)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Pagu Anggaran (RP)		
	2	21	02	2.01	0007					Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian				Sub Kegiatan baru sesuai dengan RENSTRA 2026-2030
	2	21	02	2.01	0008					Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggaraan persandian				Sub Kegiatan baru sesuai dengan RENSTRA 2026-2030
	2	21	02	2.02		Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik Pola Hubungan Komunikasi Sandi (PHKS) yang diterapkan pemerintah daerah berdasarkan pola hubungan komunikasi sandi	20 Persen	229.924.000,00	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik Pola Hubungan Komunikasi Sandi (PHKS) yang diterapkan pemerintah daerah berdasarkan pola hubungan komunikasi sandi	30 Persen	229.924.000,00	0,00	

No	Kode					RENJA MURNI TAHUN 2025				PERUBAHAN RENJA TAHUN 2025				Selisih (Bertambah/Berkurang)	Keterangan
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Pagu Anggaran (RP)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Pagu Anggaran (RP)		
	2	21	02	2.02	0001	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	10 Perangkat Daerah	229.924.000,00	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	30 Perangkat Daerah	229.924.000,00	0,00	
	2	21	02	2.02	0002					Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan pemetaan pola hubungan komunikasi sandi pemerintah Daerah.				Sub Kegiatan baru sesuai dengan RENSTRA 2026-2030

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi Tahun 2025 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi tahun 2023-2026 dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Cimahi serta target dan Sasaran Pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Perubahan Pemerintah Daerah Kota Cimahi Tahun 2025.

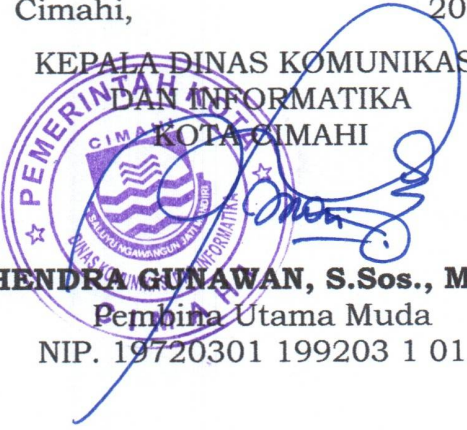
Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025 merupakan bentuk penyesuaian terhadap dinamika pembangunan, kebijakan pemerintah pusat dan daerah, serta kebutuhan pelayanan publik di sektor komunikasi dan informatika, persandian dan statistik. Perubahan ini dilaksanakan dengan tetap memperhatikan prinsip efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat serta arah pembangunan jangka menengah daerah.

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2025, rata-rata capaian kinerja program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika mencapai 46,23% dari target tahunan. Sementara itu, realisasi anggaran sampai dengan Triwulan I tercatat sebesar Rp 3.477.459.934 dari total anggaran sebelum perubahan Rp. 16.793.569.564, atau sekitar 20,7% dari anggaran awal.

Adapun total anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika sebelum perubahan adalah sebesar Rp. 16.793.569.564 (enam belas miliar tujuh ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh empat rupiah). Setelah dilakukan perubahan, total anggaran menjadi sebesar Rp. 16.224.270.964 (enam belas miliar dua ratus dua puluh empat juta dua ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus enam puluh empat rupiah). Dengan demikian, terdapat penurunan anggaran sebesar Rp 569.298.600 (lima ratus enam puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus rupiah), atau turun sekitar 3,39% dari total anggaran semula.

Perubahan Rencana Kerja ini akan dijadikan sebagai pedoman bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi dalam menjalankan tugas dan fungsi SKPD serta sebagai acuan dalam menyusun program, kegiatan, dan sub kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi tahun 2025, terutama dalam rencana pencapaian kinerja.

Pelaksanaan rencana kerja sebagaimana tercantum dalam BAB III dapat dilaksanakan sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dengan asumsi penyediaan dana sesuai dengan yang diperkirakan. Rencana target kinerja dan anggaran belum mempertimbangkan aspek ketersediaan dana Pemerintah Daerah Kota Cimahi dan kebijakan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota Cimahi.

Cimahi, 2025
KEPALA DINAS KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA
KOTA CIMAHI

HENDRA GUNAWAN, S.Sos., M.I.P.
Pembina Utama Muda
NIP. 19720301 199203 1 012